

---

---

## LEGALISASI UNDANG-UNDANG INTEGRASI PENGUNGS DI JERMAN PADA ERA ANGELA MERKEL TAHUN 2014-2019

**Muhammad Reza Fauzan, Ismiyatun**

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

ismiyatun@unwahas.ac.id

### ABSTRACT

This study aims to explain the driving factors and interests of Germany in legalizing the Refugee Integration Law in the Angela Merkel era in 2014-2019. This research was structured with qualitative research methods and the data analysis used was descriptive qualitative. The data collection technique used is through library research by collecting and processing secondary data obtained from literatures, scientific journals, websites, and other sources that have a correlation with this research. The results showed that Germany's interest factor in legalizing the Refugee Integration Act in the Angela Merkel era in 2014-2019 was to achieve Germany's national interests which included the interests of Self Preservation, Territory Integrity, and Economic Well Being. The three general categories of national interest, the author uses the theory of national interest belonging to Jack C. Plano and Roy Olton.

Keywords: Legalization of Laws, Refugees, Angela Merkel

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor pendorong serta kepentingan Jerman dalam melegalisasi Undang-undang Integrasi Pengungsi pada era Angela Merkel tahun 2014-2019. Penelitian ini disusun dengan metode penelitian kualitatif dan analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi kepustakaan *library research* dengan mengumpulkan dan mengolah data sekunder yang diperoleh dari literatur-literatur, jurnal ilmiah, *websites*, serta sumber-sumber lain yang memiliki korelasi terhadap penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor kepentingan Jerman dalam melegalisasi Undang-undang Integrasi Pengungsi pada era Angela Merkel tahun 2014-2019 adalah untuk mencapai kepentingan nasional Jerman yang mencakup kepentingan *Self Preservation*, *Territory Integrity*, dan *Economic Well Being*. Ketiga kategori umum kepentingan nasional tersebut, penulis menggunakan teori kepentingan nasional milik Jack C. Plano dan Roy Olton.

**Kata kunci : Legalisasi Undang-undang, Pengungsi, Angela Marke**

## PENDAHULUAN

### 1. LATAR BELAKANG

Sejak terjadinya pergolakan di wilayah Timur Tengah, banyak masyarakat di wilayah konflik seperti di Suriah dan Yaman yang mengungsi ke luar negaranya. Umumnya, mereka ingin mengungsi di wilayah dimana banyak terdapat masyarakat yang tentram dan damai, yaitu di negara-negara di kawasan Eropa. Uni Eropa (UE) menjadi wilayah tujuan pengungsi dari Mediterania Selatan dikarenakan beberapa hal. Pertama, adalah karena kedekatan letak geografis. Kedua, wilayah tersebut hanya dibatasi oleh laut Mediterania, sehingga hanya menggunakan kapal para pengungsi Mediterania Selatan dapat mencapai kawasan Eropa. Selain alasan geografis, perekonomian yang baik juga menjadi alasan UE dipilih sebagai tempat tujuan para pengungsi. Italia, Yunani, dan Malta, merupakan negara dekat pantai yang mudah dicapai, sehingga menjadi pintu masuk bagi pengungsi untuk menuju negara kaya di Eropa seperti Jerman, Inggris, dan Prancis.<sup>1</sup>

Yunani menjadi daerah terbanyak yang menerima kedatangan pengungsi yang mayoritas berasal dari Suriah dan Afghanistan dengan jumlah kedatangan hingga mencapai 68.000 pengungsi. Disusul Italia yang menerima jumlah pengungsi hingga mencapai 67.500 pengungsi yang berasal dari Eritrea, Nigeria, dan Somalia. Sehingga jumlah pengungsi yang masuk ke Eropa melalui Laut Mediterania sepanjang enam bulan pertama pada tahun 2015 mencapai 137.000.<sup>2</sup> Banyak negara Eropa yang tidak mau menerima imigran dari Timur Tengah dikarenakan krisis ekonomi yang melanda Eropa enam bulan terakhir di tahun 2015 yang membuat negara-negara Eropa tidak sanggup menampung dan merawat para pengungsi. Dengan masih banyaknya sentimen *Islamophobia* dan *Xenophobia* di negara-negara Eropa terutama akibat maraknya serangan teror ISIS kepada negara Barat membuat banyak negara di Eropa enggan

---

<sup>1</sup> Ani Kartika Sari, "Upaya Uni Eropa Dalam Menangani Pengungsi Dari Negara-Negara Mediterania Selatan di Kawasan Eropa", *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*. Volume 3. No 3, 2015, hal 547-558.

<sup>2</sup> UNHCR, "Europe Refugees and Migrants Emergency Response: Nationality of Arrivals to Greece, Italy, and Spain", *Annual Report*, 2015, hal 5-6.

menampung para pengungsi, meskipun masih terdapat negara yang menerima pengungsi dengan catatan hanya pengungsi yang beragama non-Islam.<sup>3</sup>

Jerman adalah salah satu negara yang membuka lebar untuk menjadi negara penampungan pengungsi dan tidak membatasi pengungsi untuk pergi ke Jerman, meskipun negara-negara di belahan Eropa membatasi pengungsi masuk ke negaranya dan bahkan menutup diri dari pengungsi. Presiden Komisi Eropa, Kanselir Jerman, Angela Merkel, menegaskan negara-negara anggota Uni Eropa semestinya langsung menyepakati kuota mengikat tanpa membatasi jumlah pengungsi yang akan diambil. Jerman mulai menerima secara besar-besaran masuknya pengungsi Suriah pada tahun 2013. Jerman adalah salah satu negara di Eropa yang menjadi tujuan utama bagi para pengungsi asal Timur Tengah. Mereka memandang Jerman sebagai tempat yang layak bagi mereka untuk mengungsi. Selain karena kondisi perekonomian yang cukup stabil di kawasan Eropa, mereka memandang Jerman adalah negara yang cukup ramah dan terbuka terhadap para imigran, karena sejarah panjang Jerman dalam penerimaan pengungsi dan imigran terutama dari wilayah Eropa Timur.

Para pengungsi yang sebagaian besar berasal dari Timur Tengah utamanya dari Suriah tidak langsung menuju ke Jerman saat mencari suaka. Peta sebaran pengungsi Suriah di Eropa dan rute perjalanan para pengungsi tersebut hingga masuk ke Jerman adalah sebagai berikut; dari Suriah para pengungsi menyeberang ke negara perbatasan Turki. Beberapa pengungsi menetap di Turki dan beberapa pengungsi lainnya melanjutkan perjalanan menyeberang ke pulau-pulau di Yunani. Selanjutnya, para pengungsi melanjutkan perjalanan darat menuju Makedonia yaitu pusat transit bagi para migran, pendatang ataupun para pencari suaka yang datang dari Yunani. Kebanyakan dari mereka lalu menumpang bus menuju Serbia. Setelah dari Serbia para pengungsi langsung menuju ke Hungaria. Banyaknya jumlah pengungsi menyebabkan Hungaria memutuskan untuk membangun pagar kawat berduri sepanjang 161

---

<sup>3</sup> “BBC: Slowakia Hanya Akan Menerima Pengungsi Kristen”, [http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/08/150819\\_dunia\\_slowakia\\_kristen](http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/08/150819_dunia_slowakia_kristen), diakses pada tanggal 24 November 2018.

kilometer di daerah perbatasan dengan Makedonia. Dari Hungaria para pengungsi menggunakan kereta menuju ke Austria, namun Austria memutuskan untuk menghentikan layanan kereta dan menutup akses jalan di perbatasan. Setelah Austria kebanjiran hampir sepuluh ribu pengungsi Suriah pada tahun 2013, para pengungsi memutuskan untuk melanjutkan perjalanan langsung menuju ke Jerman didukung pula oleh kebijakan Jerman yang ramah terhadap pengungsi. Beberapa pengungsi diantaranya pengungsi memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke Swedia dan Denmark, akan tetapi Denmark menutup jalur kereta pada awal tahun 2015 dan akses jalan satu-satunya bagi pengungsi terhubung kembali ke wilayah Jerman.<sup>4</sup>

Alasan keramahan Jerman terhadap pengungsi didasarkan karena pengalaman warga Jerman di masa lalu. Jerman kalah di Perang Dunia II dan jutaan warga Jerman menjadi pengungsi dan terpaksa meninggalkan rumah-rumah mereka di Jerman bagian timur. Para pengungsi berpotensi memperkuat sektor tenaga kerja Jerman, yang tentunya akan berujung pada penguatan ekonomi. Merujuk dari data penuaan warga yang dirilis oleh Komisi Eropa tahun 2015, populasi Jerman akan menurun dari 81,3 juta orang pada 2013 menjadi 70,8 juta orang pada 2060. Data tersebut menyebutkan bahwa prediksi warga yang berusia 65 tahun ke atas akan meningkat dari 32 persen pada tahun 2015, menjadi 59 persen pada 2060. Jerman diprediksi akan kekurangan warga usia produktif, yang mengancam sektor ketenagakerjaan dalam negeri. Jerman berupaya mengamankan sektor tenaga kerja, karena terancam depopulasi akibat penuaan masyarakat. Jerman mengharapkan pengungsi dapat mengisi peluang tenaga kerja di Jerman.<sup>5</sup>

Jerman adalah negara yang saat ini terus dipantau gerak-gerik perubahan kebijakannya terhadap urusan pengungsi. Berdasarkan penjelasan diatas, pemerintah

---

<sup>4</sup> Faisal Assegaf, “Rute Pengungsi Suriah hingga Tiba di Eropa”, <http://albalad.co/kabar/2015A3545/rute-pengungsi-suriah-hingga-tiba-di-eropa/> , diakses pada tanggal 24 November 2018.

<sup>5</sup> Amanda Puspita Sari, “CNN: Ada Apa di Balik Kedermawanan Jerman kepada Pengungsi”, <http://www.cnnindonesia.com/internasional/20150910145740-13477901/ada-apa-di-balik-kedermawanan-jerman-kepada-pengungsi/>, diakses pada tanggal 24 November 2018.

dan masyarakat Jerman mengambil sikap serupa dengan mengedepankan semangat kemanusiaan nomor satu untuk menampung puluhan ribu pengungsi utamanya pengungsi yang berasal dari Suriah. Puncaknya, pada tahun 2015 pengungsi Suriah memang membludak jauh dari ekspektasi dan menyebabkan kekalutan di urusan imigrasi Jerman. Pemerintah Jerman menyatakan mulai kewalahan menampung ratusan ribu pengungsi yang datang sekaligus melintasi perbatasan negara tetangga. Kebijakan Angela Merkel membuka kran pengungsi secara besar-besaran ini menuai reaksi pro dan kontra bagi masyarakat Jerman sendiri.

Jumlah pengungsi yang meningkat secara drastis di Jerman menimbulkan terjadinya konflik bermotif rasisme yang tentunya akan mengancam keamanan Jerman. Sehingga Jerman memutuskan mengambil kebijakan untuk membatasi bahkan menutup kran pengungsi yang membludak yang mulai dijalankan pada akhir tahun 2015. Menutup pintu perbatasan untuk sementara waktu merupakan salah satu tindak lanjut rencana perancangan kebijakan mengenai pengungsi.<sup>6</sup>

Jerman tetap mempertahankan eksistensinya sebagai negara yang peduli kemanusiaan utamanya dalam hal pengungsi, meskipun hal tersebut diimbangi dengan keuntungan yang akan diterima Jerman dari pengungsi utamanya dalam bidang tenaga kerja dan ekonomi. Hal tersebut ditunjukkan Jerman melalui persetujuan Angela Merkel terhadap legalisasi Undang-undang Integrasi Pengungsi atau *The Integration Act of Refugees* di Jerman. Jerman sebelumnya telah memiliki Undang-undang mengenai peraturan dan hukum imigrasi dan integrasi untuk imigran secara umum di Jerman yang sekaligus menjadi acuan pembuatan Undang –undang Integrasi Pengungsi yang memiliki peraturan dan spesifikasi khusus dalam mengintegrasikan pengungsi dan dilegalisasi pada tanggal 31 Juli 2016 dan mulai diberlakukan di Jerman pada tanggal 6 Agustus 2016. Sekilas mengenai Undang-undang Integrasi Pengungsi, para pencari suaka atau para pengungsi yang telah berada di Jerman harus memanfaatkan peluang

---

<sup>6</sup>“Deutsche Welle: Jerman Tutup Perbatasan, Uni Eropa Sidang Darurat”, <http://www.dw.com/id/jerman-tutup-perbatasan-uni-eropa-sidang-darurat/a-18712505>, diakses pada tanggal 24 November 2018.

kerja, ikut dalam pelatihan yang ada dan wajib dapat berbahasa Jerman, utamanya hal ini memicu para pencari suaka mampu bersaing di pasar Jerman, integrasi yang cepat dalam pelatihan dan memiliki kesadaran penuh untuk mematuhi aturan-aturan hukum yang berlaku utamanya Undang-undang yang mengatur mengenai integrasi pengungsi.<sup>7</sup>

Undang-undang Integrasi Pengungsi tidak lepas dari "dukungan dan tantangan". Pengungsi yang menunjukkan potensi untuk mengintegrasikan diri dan dapat memanfaatkan peluang dalam pengaplikasian Undang-undang ini memiliki keuntungan diantara lain: dapat tinggal secara permanen di Jerman, selain itu memiliki akses yang lebih mudah dan lebih cepat untuk kelas integrasi dan kesempatan kerja. Pengungsi yang menolak untuk bekerja sama akan menghadapi pengurangan manfaat.<sup>8</sup> Kebijakan ini tentunya berkaitan dengan kepentingan Jerman. Kepentingan yang melatarbelakangi Jerman terhadap *open door policy* pada pengungsi Suriah inilah yang nantinya akan dikaji oleh penulis.

## **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan pemaparan di atas dapat ditarik rumusan masalah yang akan dibahas, yaitu “Mengapa Jerman Melegalisasi Undang-Undang Integrasi Pengungsi di era Angela Merkel?”

## **KERANGKA PEMIKIRAN**

Untuk menjawab permasalahan mengenai kepentingan kebijakan *open door policy* Jerman serta legalisasi Undang-undang integrasi pengungsi pada era Angela Merkel maka kerangka pemikiran atau teori yang akan digunakan penulis untuk menjawab permasalahan tersebut adalah:

Teori Kepentingan Nasional

---

<sup>7</sup> “Mahdi News: Kabinet Jerman Loloskan Undang-undang Integrasi Pengungsi”, <http://www1.mahdi-news.com/2016/05/26/kabinet-jerman-loloskan-Undang-undang-integrasi-pengungsi/>, diakses pada tanggal 24 November 2018.

<sup>8</sup> Jenney Gesley, “Germany: Act to Integrate Refugees Enters Into Force”. <http://www.loc.gov/law/foreign-news/article/germany-act-to-integrate-refugees-enters-into-force/>, diakses pada tanggal 24 November 2018.

Kepentingan nasional (*national interest*) adalah konsep yang populer dalam analisa hubungan internasional, dimana hal ini biasanya digunakan untuk mendeskripsikan, menjelaskan, meramalkan maupun menganjurkan perilaku internasional. Analisis sering memakai konsep kepentingan nasional sebagai dasar untuk menjelaskan perilaku luar negeri suatu negara.<sup>9</sup> Kepentingan-kepentingan suatu negara dalam menjelaskan identitas mereka memiliki kegunaan-kegunaan. Penjelasan kepentingan nasional itu sendiri digambarkan oleh penjabaran James N. Rosenau. Berdasarkan penjelasan James N. Rosenau kegunaan pertama dari kepentingan nasional yaitu sebagai istilah analitis untuk menggambarkan, menjelaskan atau mengevaluasi politik luar negeri. Kegunaan kedua yaitu sebagai alat tindakan politik untuk mengancam, membenarkan, atau mengusulkan suatu kebijakan.<sup>10</sup>

Menurut Hans J. Morgenthau, kepentingan nasional merupakan pilar utama untuk mendukung politik luar negeri dan politik internasional suatu negara. Kepentingan nasional suatu negara adalah mengejar kekuasaan, yaitu apa saja yang dapat membentuk dan mempertahankan pengendalian suatu negara atas negara lain. Kekuasaan tidak akan tercapai tanpa adanya kekuatan nasional dan politik suatu negara tidak lepas dari kepentingan nasional, karena tujuan politik luar negeri adalah mencari, mempertahankan, dan memperkuat kepentingan nasional.<sup>11</sup>

Terdapat perbedaan yang mendasar dalam kepentingan nasional yaitu: kepentingan nasional yang bersifat vital atau esensial juga kepentingan nasional yang bersifat non-vital atau sekunder. Kepentingan nasional yang bersifat vital biasanya berkaitan dengan kelangungan hidup negara tersebut serta nilai-nilai inti/*core values* yang menjadi identitas kebijakan luar negerinya. Sedangkan kepentingan nasional non-vital atau sekunder tidak berhubungan secara langsung dengan eksistensi negara itu

---

<sup>9</sup> Mohtar Masoed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, Pusat Antar Universitas, Yogyakarta, 1998, hal 146.

<sup>10</sup> *Ibid*, Hal 34.

<sup>11</sup> Tulus Warsito, *Teori-Teori Politik Luar Negeri: Relevansi dan Keterbatasannya*, Bigraf Yogyakarta, 1998, hal 29.

namun tetap diperjuangkan melalui kebijakan luar negeri.<sup>12</sup> Kepentingan vital dalam hal ini menjelaskan seberapa jauh kepentingan tersebut ada dan digunakan, dimana lebih kepada keadaan darurat suatu negara sehingga harus segera diputuskan. Berbeda dengan kepentingan non-vital yang digunakan karena prosesnya berlangsung lama namun hasilnya dan fungsinya dapat dirasakan lebih baik dikemudian hari dengan jangka waktu yang lama.

Menurut analisis kepentingan nasional, peran aktor dalam hal ini negara, akan mengejar apapun yang dapat membentuk dan mempertahankan, pengendalian suatu negara atas negara lain. Pengendalian tersebut berhubungan dengan kekuasaan yang tercipta melalui teknik-teknik paksaan ataupun kerjasama.<sup>13</sup> Tindakan tersebut tergantung dari seberapa besar *power* yang dimiliki negara tersebut. Sejalan dengan hal tersebut maka negara dapat merubah alur yang tadinya hanya demi kepentingan awal namun dapat menjadi kepentingan baru.

Kepentingan baru ini dilakukan dengan tetap menjalankan kepentingan awal atau bahkan dapat merubah kepentingannya tanpa menggunakan dasar dari kepentingan yang ingin dicapai sebelumnya.

Menurut Jack C. Plano dan Roy Olton, kepentingan nasional suatu negara adalah kepentingan untuk mempertahankan kelangsungan hidup atau *survival*, kemerdekaan dan kedaulatan negara, keamanan militer, politik, dan ekonomi. Jack C.Plano dan Roy Olton juga mendefinisikan kepentingan nasional sebagai dasar tujuan mendasar serta faktor paling menentukan yang memandu para pembuat keputusan dalam memutuskan politik luar negeri. Walaupun kepentingan nasional yang ingin dicapai suatu negara berbeda-beda dalam pelaksanaannya, namun pada umumnya terdapat lima kategori umum yang disebut oleh Jack C. Plano, yaitu:<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Alexius Jemadu, *Politik Global dalam Teori dan Praktik, Graha Ilmu*, Yogyakarta, 2008, hal 67-69.

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup> Jack C. Plano & Roy Olton, *The International Relations Dictionary*, Third Edition, Western Michigan University, ABL-Clio California, 1980, hal 27.



1. *Self Preservation*, yaitu hak untuk mempertahankan eksistensi diri, tujuannya untuk mempertahankan diri agar negara yang memiliki *power* besar tidak melakukan atau merebut hegemoni kekuasaan yang nantinya dapat menimbulkan perpecahan, untuk mempertahankan diri tersebut negara yang bersangkutan melakukan kerjasama bilateral ataupun dalam wadah organisasi internasional. Konsep pertahanan diri atau *Self Preservation* ini mengalami perkembangan, sebab pertahanan diri bukan hanya didasarkan pada landasan pertahanan terhadap geografis negara tetapi berkaitan dengan hegemoni suatu negara kepada negara lainnya sehingga menggunakan kekuatan-kekuatan dalam negeri untuk mempertahankan hegemoni kekuasaannya tersebut.

2. *Independence* yang berarti mandiri, kedaulatan suatu negara untuk mengatur rumah tangga negara baik kedalam maupun keluar, militer dan ekonomi tanpa campur tangan dan tunduk kepada negara lain tujuannya untuk mendapatkan kekuatan dengan melakukan kerjasama dengan negara lain agar negara tersebut tidak dijajah atau tunduk kepada negara lainnya.

3. *Military Security*, keamanan suatu negara dinilai dengan kekuatan militer untuk mempertahankan atau menjaga keamanan territorial dari kekuatan militer negara lain maupun kelompok separatis, tujuannya untuk menjaga negaranya dari kekuatan militer negara lain atau sebagai antisipasi dari gangguan militer negara lainnya.

4. *Territory Integrity*, yaitu kepentingan nasional untuk mengamankan daerah territorialnya dan sumber daya yang berada dalam daerah teritori sebuah negara, tujuannya untuk mendapatkan kebutuhan terhadap suatu wilayah yang dinilai strategis dan menguntungkan.

5. *Economic Well Being*, tujuannya untuk memperoleh cadangan devisa negara lain, misalnya minyak dan gas untuk kesejahteraan ekonomi dalam negeri.

Kepentingan nasional suatu negara bangsa timbul akibat terbatasnya sumber daya nasional, atau kekuatan nasional, sehingga negara bangsa yang bersangkutan merasa perlu untuk mencari pemenuhan kepentingan nasional keluar batas-batas negaranya.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Hans Joachim Morgenthau, *Politik Antar Bangsa*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1991, hal 5.

Jerman, dalam setiap aktivitas politik luar negeri pada kenyataannya berlandaskan pada kepentingan nasional. Dari lima cakupan kepentingan nasional yang diungkapkan oleh Jack C. Plano dan Roy Olton, jika dikaitkan dengan kepentingan Jerman dalam legalisasi Undang-undang Integrasi Pengungsi, dapat dilihat bahwa faktor kepentingan mempertahankan diri atau *self preservation*, kepentingan *territory integrity* dan kepentingan ekonomi atau *economic well being* memiliki peran besar dan sebagai kepentingan Jerman dalam legalisasi Undang-undang tersebut.

## **HIPOTESA**

Berdasarkan kerangka pemikiran mengenai permasalahan “Apakah kepentingan Jerman dalam Legalisasi Undang-undang Integrasi Pengungsi” maka dapat ditarik argument pokok bahwa kepentingan Legalisasi Undang-undang Integrasi Pengungsi di Jerman era Angela Merkel dilatarbelakangi oleh kepentingan *Self Preservation*, *Territory Intergriy*, dan *Economic Well Being* sebagaimana dipaparkan diatas.

## **METODE PENELITIAN**

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dalam proses mengerjakan dan menyelesaikan skripsi ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi kepustakaan *library research* dengan mengumpulkan dan kemudian mengolah data sekunder yang diperoleh dari literatur-literatur, jurnal ilmiah, websites serta sumber-sumber lain yang memiliki korelasi terhadap penelitian ini. Jenis analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu dengan cara menggambarkan realitas yang terjadi dan menjelaskan mengapa hal itu terjadi.

## **PEMBAHASAN**

### **A. KEPENTINGAN *SELF PRESERVATION***

#### **A.1 Kebijakan *Welcome Refugees* Atas Dasar Solidaritas Bagi Masyarakat Jerman**

Jerman merupakan salah satu negara di Eropa yang menjadi tujuan utama bagi para pengungsi. Berkenaan mengenai pengungsi, Jerman memiliki sejarah panjang yang menjadi alasan mengenai keramahan Jerman terhadap pengungsi. Jerman

merupakan salah satu negara berpengaruh di dunia internasional. Jerman juga terlibat aktif dalam Perang Dunia I dan II. Dengan ideologi *Fasisme* yang sangat kuat pada masa kepemimpinan Adolf Hitler menjadikan pembangkit dan kekuatan Jerman setelah Perang Dunia I. *Fasisme* Jerman adalah semangat *chauvinisme* bangsa Jerman sebagai bangsa keturunan ras Arya yang dikenal agung dan mulia, berbeda dengan bangsa lainnya yang dianggap sebagai keturunan primitif. Melalui ideologi fasisime tersebut, Hitler membangkitkan Jerman dan menguasai Jerman dengan tangan besinya. Kekuasaan yang berpusat penuh pada Hitler membangkitkan Jerman dari kekalahan Perang Dunia I serta menimbulkan kebencian bagi negara-negara sekutu pemenang Perang Dunia I.<sup>16</sup>

Berkaitan dengan sejarah panjang Jerman mengenai keramahannya terhadap pengungsi, Angela Merkel yang menjabat sebagai Kanselir Jerman seakan turut menekankan bahwa Jerman adalah negara yang tetap konsisten menerima para pencari suaka tersebut lewat haluan politiknya. Keseriusan Merkel mengenai penanganan terhadap para pencari suaka atau pengungsi yang berada di Jerman dibuktikan dalam politik pintu terbuka yang dicanangkan oleh Merkel atau yang sering disebut dengan *Welcome Refugees* pada Agustus 2015.

Kebijakan *Welcome Refugees* oleh Jerman melalui Angela Merkel bukanlah tanpa alasan. Beberapa pihak dari oposisi partai Angela Merkel dan sebagian masyarakat Jerman menilai bahwa Merkel dalam mencanangkan kebijakan tersebut berada dalam kondisi impulsif dan tidak berpikir panjang. Akan tetapi penilaian tersebut terbantahkan ketika Merkel memberikan reaksi dan respon terhadap golongan *Neo-Nazi* melukai polisi di Heidenau. Menurut data, Merkel perlu tiga hari untuk menemukan kata-kata dan tindakan yang tepat guna memberikan hukuman yang layak bagi mereka. Merkel tidak mengambil keputusan secara tergesa-gesa sebelum mendapatkan hasil musyawarah yang jelas dengan pihak-pihak terkait yang

---

<sup>16</sup> Imanuel Chrissandi “Dampak Sikap Jerman Terhadap Krisis Pengungsi Bagi Keamanan Regional Di Eropa”, *Tesis FISIP Universitas Hasanuddin*, 2016, hal. 3.

bersangkutan. Menurut data terkait, mayoritas rakyat Jerman dinilai yakin dengan menerima 800.000 pengungsi pada tahun 2015 dan tidak akan menjadi masalah bagi Jerman. Hampir 70% dari rakyat Jerman berpikir bahwa imigran bisa memperkuat negara Jerman itu sendiri.<sup>17</sup> Hal tersebut tentunya memperkuat Jerman di dalam pandangan internasional sebagai negara yang memiliki konsistensi dan memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi.

Puncak gelombang pengungsi yang menyebabkan Merkel meyakini untuk mencanangkan kebijakan *Welcome Refugees* sebagai haluan politik tetap Jerman terhadap pengungsi ketika adanya konflik Suriah yang telah berubah menjadi konflik global dengan banyaknya negara kunci yang berlomba-lomba untuk menjejakan kakinya di atas wilayah yang dilanda perang saudara selama hampir empat tahun lamanya. Negara-negara itu diantaranya adalah Amerika Serikat, Uni Eropa (UE), Rusia, Arab Saudi, dan beberapa negara Teluk lain, Iran serta Turki. Pertemuan di Wina oleh negara-negara tersebut sempat digelar, namun belum ditemukan solusi dan tindak lanjut yang tepat guna menghentikan konflik tersebut.<sup>18</sup> Kondisi tersebut menyebabkan bencana sosial berupa gelombang pengungsi. Lebih dari 230.000 orang tewas di Suriah sejak demonstrasi anti-pemerintah muncul pada Maret 2011, yang kemudian berkembang menjadi perang sipil antara pasukan pro-rezim, gerilyawan, dan sejumlah kelompok garis keras. Menurut laporan Persatuan Bangsa-bangsa (PBB), lebih dari empat juta warga Suriah telah melarikan diri dari perang sipil yang melanda negara tersebut untuk menjadi pengungsi.<sup>19</sup>

Diketahui bahwa sekitar 1,1 juta orang memasuki Jerman pada tahun 2015, setelah mereka melarikan diri dari daerah perang dan kemiskinan yang melanda negeri asalnya. Sekitar 70 persen dari para migran yang sudah tiba di Jerman mendapat

---

<sup>17</sup> Suchaya Tjoa, "Latar Belakang Jerman Bersedia Menerima Pengungsi Timteng 800.000 Tahun ini", [http://www.kompasiana.com/makenyok/latar-belakang-jerman-bersedia-menerima-pengungsi-timteng-800-000-tahun-ini\\_560fc42b63afbddd6099400a2](http://www.kompasiana.com/makenyok/latar-belakang-jerman-bersedia-menerima-pengungsi-timteng-800-000-tahun-ini_560fc42b63afbddd6099400a2), diakses pada tanggal 28 November 2018.

<sup>18</sup> Yon Dema, "Apa Kepentingan Rusia dan Turki di Konflik Suriah", <https://m.tempo.co/read/news/2015/11/25/117722187/apa-kepentingan-rusia-dan-turki-di-konflik-suriah>, diakses pada tanggal 28 November 2018.

<sup>19</sup> *Ibid.*

pekerjaan yang sesuai tetapi menambahkan bahwa sebagian besar dari mereka masih bergantung pada jaminan sosial sebelum mendapat pekerjaan.

Atas dasar hal tersebut, Jerman dibawah kepemimpinan Angela Merkel tergerak memberikan bantuan atas dasar kemanusiaan. Hal tersebut tidak lepas dari situasi darurat dan rasa solidaritas tinggi dari masyarakat Jerman sendiri. Hal tersebut tentunya disebabkan sebagian besar masyarakat Jerman memiliki pengalaman sejarah sebagai pengungsi di masa lalu pada kekalahan Perang Dunia II. Jerman melalui kepemimpinan Angela Merkel untuk itu ingin mempertahankan politik pintu terbuka bagi pengungsi. Hal tersebut dibuktikan dengan respon dan sikap Jerman untuk memberi kemudahan bagi pengungsi dalam pemberian suaka yaitu dengan tidak menerapkan *individual assessment* bagi para pencari suaka utamanya yang berasal dari Suriah dikarenakan semakin meningkatnya jumlah pengungsi Suriah yang masuk ke Jerman semenjak diberlakukannya kebijakan *Welcome Refugees*. Tidak diterapkannya *individual assessment* artinya para pencari suaka, utamanya yang berasal dari Suriah tidak perlu mengikuti prosedur pemeriksaan per-individu secara ketat oleh pihak berwenang, seperti pemeriksaan asal-usul pengungsi, latar belakang pendidikan serta rute pengungsi yang akan diuji kebenarannya tiap kasus. Hal tersebut tentunya dapat menimbulkan konsekuensi prosedur yang cepat bagi para pengungsi. Demikian perkiraan para petugas dari dinas federal untuk migrasi dan pengungsi Jerman.<sup>20</sup>

## **A.2 Gejolak Jerman Akibat Kebijakan *Welcome Refugees***

Kebijakan Angela Merkel dalam politik pintu terbuka atau *Welcome Refugees* tidak berjalan lancar seperti yang telah diprediksi Merkel. Jerman merupakan salah satu negara di Eropa yang menjadi tujuan utama bagi para pengungsi. Ketika konflik Suriah menjadi permasalahan internasional dan menimbulkan banyak pengungsi, kepercayaan para pengungsi yang berasal dari Timur Tengah utamanya Suriah tentunya lebih memilih Jerman sebagai tempat untuk memperoleh perlindungan. Mereka memandang

---

<sup>20</sup> Egidius Patnistik, "Jerman Cabut Perlakuan istimewa Bagi Pengungsi", <http://internasional.kompas.com/read/2016/01/04/10383541/Jerman.Cabut.Perlakuan.Istimewa.bagi.Pengungsi>, diakses pada tanggal 28 November 2018.

Jerman sebagai tempat yang layak bagi mereka untuk mengungsi. Selain karena kondisi perekonomian yang cukup stabil di kawasan Eropa, mereka juga memandang bahwa Jerman adalah negara yang cukup ramah dan terbuka terhadap para imigran, karena sejarah panjang Jerman dalam penerimaan pengungsi dan imigran terutama dari wilayah Eropa Timur. Pada tahun 2013, Jerman melalui Angela Merkel mulai menunjukkan reaksi tangan terbuka terhadap para pengungsi Suriah dengan membuka pintu bagi para pengungsi tersebut. Meskipun kebanyakan dari negara-negara di Uni Eropa (UE) tidak menyanggupi dalam menampung pengungsi dengan jumlah besar seperti yang dilakukan oleh Jerman.

Masuknya pengungsi Suriah yang mulai membanjiri Jerman dengan berbagai kemudahan akses masuk dan didukung pula oleh berbagai kemudahan fasilitas melalui kebijakan Merkel melalui *Welcome Refugees* menyebabkan banyak respon negatif yang terjadi di wilayah Jerman. Sejak diterapkannya kebijakan *Welcome Refugees* sejak Agustus 2015 menyebabkan gelombang pengungsi mulai marak masuk ke wilayah Jerman utamanya pengungsi yang berasal dari Suriah. Pada awal kebijakan diterapkan, Jerman menampung pengungsi hingga berjumlah 500 ribu hingga 800 ribu jiwa yang berasal dari Suriah. Hingga akhir tahun Jerman telah menampung pengungsi Suriah hingga 1,1 juta jiwa.<sup>21</sup>

Kenyataannya, kebijakan Merkel tersebut malah memancing protes dari negara-negara Uni Eropa (UE) lainnya yang berada di wilayah Balkan, seperti Serbia, Slovenia, dan Hungaria. Mereka menganggap, kebijakan Jerman membuka negaranya untuk para pengungsi dari Timur Tengah membuat negara-negara Balkan kewalahan menangani pengungsi yang melintas di wilayah Balkan. Hal tersebut mengakibatkan Hungaria dan Serbia menutup perbatasan negaranya dari para pengungsi untuk melintas menuju Jerman.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup>“Jerman Bisa Tampung 500 Ribu Pengungsi Per Tahun”, [http://www.dw.com/id/\\_jerman-bisatampung-500-ribu-pengungsi-per-tahun/a-18699788](http://www.dw.com/id/_jerman-bisatampung-500-ribu-pengungsi-per-tahun/a-18699788), diakses pada tanggal 27 Februari 2017.

<sup>22</sup> “Bendung Laju Migran, Hungaria Tutup Perbatasan Dengan Kroasia”, [http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/10/151017\\_dunia\\_hungaria\\_migran](http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/10/151017_dunia_hungaria_migran), diakses pada tanggal 28 November 2018.

Berjalannya waktu membuat Jerman terlihat kewalahan menampung pengungsi yang bergerak secara massal menuju ke Jerman. Tidak hanya itu, banyak pula protes dari masyarakat Jerman, khususnya dari faksi kanan yang menolak pengungsi karena mereka merasa bahwa lonjakan pengungsi yang datang ke Jerman dapat membahayakan dan mengancam jumlah penduduk asli Jerman. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya aksi-aksi yang dilakukan kelompok sayap kanan untuk menolak pengungsi.<sup>23</sup> Sebut saja kasus gerakan masyarakat *Pegida*, gerakan itu menyatakan diri sebagai kelompok patriotis Eropa yang menentang *Islamisasi*, karena sebagian besar pengungsi tersebut beragama Islam. Dalam demonstrasi itu juga hadir warga biasa, yang menyatakan tidak berpaham ekstrim kanan, tetapi sekedar merasa khawatir akan masa depan anak dan cucunya, jika terlalu banyak pengungsi yang membawa kebudayaan lain datang ke Jerman. Akibatnya popularitas Kanselir Angela Merkel pun merosot.<sup>24</sup> Namun Angela Merkel tidak bergeming dan menyatakan tetap akan terus menampung banyaknya pengungsi sampai Uni Eropa (UE) sepakat menentukan jumlah kuota pengungsi yang berasal dari wilayah konflik. Bahkan Jerman telah mencapai kesepakatan dengan Turki dalam menangani kuota pengungsi sebagai lambannya tindakan Uni Eropa (UE) dalam menentukan jumlah kuota pengungsi. Namun semenjak itu Jerman dan Uni Eropa (UE) masih terus berupaya mencapai kesepakatan antar negara untuk menangani krisis pengungsi di Eropa.

Hingga puncaknya, pada akhir tahun 2015 pengungsi Suriah sangat membludak dan menyebabkan kekalutan di urusan imigrasi Jerman. Pemerintah Jerman menyatakan benar-benar kewalahan menampung ratusan ribu pengungsi yang datang sekaligus melintasi perbatasan negara tetangga. Kebijakan Angela Merkel membuka kran pengungsi secara besar-besaran tersebut menuai reaksi beragam dari masyarakat Jerman sendiri. Masyarakat Jerman mulai dilanda keresahan dan

---

<sup>23</sup> “Batasi Pengungsi, Bulgaria, Serbia, Rumania Akan Tutup Perbatasan, <http://www.beritasatu.com/dunia/316944-batasi-pengungsi-bulgaria-serbia-rumania-akan-tutup-perbatasan.html>, diakses pada tanggal 28 November 2018.

<sup>24</sup> “Warga Jerman Mulai Tolak Pengungsi”, <http://www.dw.com/id/warga-jerman-mulai-tolak-pengungsi/a-18763584>, diakses pada tanggal 28 November 2018.

melakukan penolakan dengan adanya pengungsi utamanya yang berasal dari Suriah yang semakin membludak di Jerman. Penolakan tersebut bukannya tanpa alasan, pada akhir tahun 2015 tindak kejahatan di Jerman yang diakibatkan adanya pengungsi yang berasal dari Suriah semakin meningkat. Menurut menteri dalam negeri Jerman, tercatat bahwa sejak awal tahun 2013 hingga tahun 2015 tindak kejahatan seperti perampokan, pencurian dan pembunuhan yang disertai dengan motif kebencian meliputi rasisme, anti-Semitik atau kebencian terhadap agama para pengungsi di Jerman meningkat hingga sebesar 19,2 persen. Sedangkan tindak kekerasan seperti perusakan kamp pengungsi utamanya kamp pengungsi Suriah meningkat hingga 30 persen.<sup>25</sup>

### **A.3 Menjaga Kestabilan Politik Dan Mempertahankan Kepercayaan Masyarakat Jerman Terhadap Pemerintah**

Legalisasi Undang-undang Integrasi Pengungsi merupakan jawaban Kanselir Angela Merkel perihal krisis pengungsi. Kebijakan Angela Merkel tersebut mengambil peran penting bagi pemerintahan dalam menghadapi krisis penolakan kebijakan *welcome refugees* yang terjadi di negara Jerman, baik dari masyarakat ataupun partai oposisi. Undang-undang Integrasi Pengungsi tersebut mulai diberlakukan pada tanggal 6 Agustus 2017. Angela Merkel menaruh harapan besar terhadap pemberlakuan Undang-undang Integrasi pengungsi tersebut untuk menjaga kestabilan politik dalam negeri Jerman.

Ada beberapa point penting dalam Undang-undang Integrasi tersebut, point utama adalah pengungsi wajib mempelajari sosial budaya Jerman, utamanya adalah bahasa Jerman agar nantinya pengungsi dapat lebih mudah dalam berkomunikasi dan bersosialisasi dengan masyarakat Jerman. Masyarakat Jerman beranggapan bahwa sebuah hal yang wajar jika pengungsi belajar bahasa Jerman, menghormati nilai kebebasan dan demokrasi. Undang-undang tersebut memicu timbulnya rasa sosial yang lebih bagi masyarakat Jerman untuk membantu pengungsi dalam memahami Jerman.

---

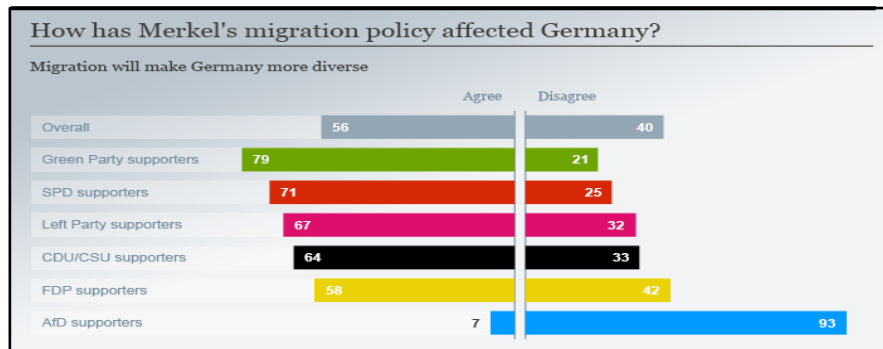
<sup>25</sup>“Kejahatan Berbasis Kebencian di Jerman Meningkat”, [http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/05/160523\\_dunia\\_jerman\\_kebencian](http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/05/160523_dunia_jerman_kebencian), diakses pada tanggal 28 November 2018.



Masyarakat Jerman bahu-membahu mengajar bahasa Jerman dan menampung anak-anak tanpa orangtua, atau mencarikan mereka pekerjaan. Di Jerman, tidak seorang pengungsi harus tidur di jalan. Kebanyakan dari mereka (pengungsi) kini berada pada kondisi hidup yang lebih baik. Hal tersebut tidak lepas dari kesediaan penduduk Jerman untuk menampung pengungsi.<sup>26</sup> Penjelasan di atas menunjukkan bahwa pemberlakuan Undang-undang Integrasi Pengungsi membawa dampak positif bagi moral masyarakat Jerman yang lebih menunjukkan rasa simpati dan peduli.

Sejauh mana Undang-undang Integrasi Pengungsi tersebut mengubah Jerman? *Deutsche Welle* (DW) mengadakan jejak pendapat lewat kerjasama dengan institut riset opini yaitu *Infratest Dimap* (lihat Gambar 3.1). Sekitar seribu orang yang punya hak memberikan suara dalam pemilu ikut jajak pendapat antara 15 dan 17 Agustus 2016. Empat pernyataan jadi fokusnya, dan orang menjawab setuju atau tidak setuju. Hasilnya dijabarkan berdasarkan politik partai. Sebagai acuan: Kanselir Merkel adalah Ketua Partai Kristen Demokrat (CDU) yang beraliansi dengan Partai Kristen Sosialis (CSU).<sup>27</sup>

Gambar 3.1 Grafik Pengaruh Undang-undang Integrasi Pengungsi terhadap Jerman



Sumber : DW/*Infratest Dimap*, 2016

Berdasarkan Gambar 3.1 dapat diketahui bahwa dari hasil jejak pendapat/survey

<sup>26</sup> “Merkel: Pendetang harus belajar bahasa Jerman”, [http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/04/160414\\_dunia\\_jerman\\_integrasi](http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/04/160414_dunia_jerman_integrasi), diakses pada tanggal 2 Maret 2017

<sup>27</sup> Sabine Kinkartz, “Jerman Untung Karena Politik Pembukaan Diri bagi Pengungsi?”, <http://www.dw.com/id/jerman-untung-karena-politik-pembukaan-diri-bagi-pengungsi/a-19492144>, diakses pada tanggal 2 Maret 2017.

yang dilakukan, secara keseluruhan 56% warga Jerman beranggapan bahwa adanya pengungsi akan memberikan keanekaragaman bagi Jerman sedangkan sisanya 44% beranggapan sebaliknya. Jerman memiliki penduduk yang beraneka ragam utamanya yang berada di kota-kota besar. Di masa depan kecenderungan tersebut tentu dapat meningkat tajam. Dalam hal tersebut dapat dilihat jelas bahwa warga muda dan warga berpendidikan menyambut hangat keanekaragaman di masyarakatnya, tanpa melihat partai mana yang mereka dukung.

Adanya Undang-undang ini membuat angka konflik anti pengungsi menurun. Berdasarkan data pemerintah Jerman, konflik kekerasan terhadap pengungsi selama tahun 2015 adalah 3500 kasus, artinya setiap harinya terjadi 10 kasus kekerasan. Sedangkan sepanjang tahun 2016 tercatat terjadi kekerasan sebanyak 2455 kasus.<sup>28</sup> Kepentingan *Self Preservation* yang menyangkut kepentingan Jerman dalam menjaga kestabilan politik baik keamanan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Angela Merkel tercapai melalui legalisasi Undang-undang Integrasi Pengungsi.

## **B. KEPENTINGAN *TERRITORY INTEGRITY***

### **B.1 Kebijakan Mengintegrasikan Pengungsi Sebagai Bentuk Kepentingan *Territory Integrity***

Penulis mendefinisikan kepentingan *territory integrity* bukanlah kepentingan dalam mengamankan daerah teritorial suatu negara. Akan tetapi, yang dimaksudkan kepentingan *territory integrity* berkaitan dengan legalisasi Undang-undang Integrasi Pengungsi yaitu kepentingan Undang-undang integrasi yang telah dilegalisasi oleh Jerman menunjukkan bahwa Undang-undang tersebut dibuat untuk mengatur pengungsi yang ada di Jerman. Secara tidak langsung, tindakan Jerman dalam melegalkan Undang-undang Integrasi Pengungsi dimaksudkan untuk membuat agar para pengungsi secara tidak langsung menjadi warga negara Jerman tidak lagi berstatus sebagai pengungsi. Sehingga pengertian *integrity* dalam hal tersebut adalah mengintegrasikan orang asing dalam hal tersebut adalah pengungsi. Integritas teritorial

---

<sup>28</sup> “Jumlah Kekerasan di Jerman Menurun”, <https://www.annah.com /2017/02/27/jumlah-kekerasan-anti-pengungsi-di-jerman-menurun>, diakses pada tanggal 28 November 2018.

dalam hal tersebut bukan merupakan wilayah kedaulatan negara Jerman namun lebih kepada kepentingan Jerman untuk melindungi warga negara dan pengungsi.

Jerman telah masuk kedalam kelompok negara tujuan migrasi paling utama di dunia. Menurut data *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD), tahun 2014 Jerman merupakan negara yang paling banyak dituju oleh migran setelah Amerika Serikat. Selama beberapa tahun terakhir tersebut tidak ada negara lain di antara ke-34 negara anggota *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) yang mencatat kenaikan angka pendatang setinggi di Jerman. Sejak reunifikasi tahun 1990 terdapat 21 juta orang yang datang ke Jerman untuk menetap, sedangkan hanya 16 juta orang yang meninggalkan Jerman. Tahun 2013 tercatat angka imigrasi tertinggi sejak 1993, yaitu 1,2 juta pendatang. Neraca perpindahan penduduk pada tahun 2015 menunjukkan penambahan sebanyak 437.000 orang.<sup>29</sup>

Gelombang pengungsi yang memasuki Jerman menyebabkan terjadi krisis pengungsi di Jerman. Akibatnya terjadi penolakan dan demonstrasi di berbagai wilayah di Jerman. Hal tersebut disebabkan karena peraturan Perundang-undangan Jerman tidak mampu mengakomodir membludaknya jumlah pengungsi yang masuk ke Jerman. Kepala Dinas Intelijen Jerman, Hans-Georg Maassen mengatakan kejahatan terhadap pengungsi yang dipelopori oleh ekstrimis kanan khususnya serangan terhadap kamp-kamp pengungsi mengalami peningkatan.<sup>30</sup>

Hal tersebut memicu terbentuknya kelompok-kelompok sayap kanan dalam beberapa tahun terakhir dan juga ada potensi munculnya kelompok sayap kanan baru dengan tujuan menyerang para pencari suaka atau kamp-kamp pengungsi. Maassen sebelumnya juga menyampaikan keprihatinan tentang naiknya frekuensi kekerasan terhadap para imigran dan aksi teror oleh kelompok sayap kanan di Jerman.

---

<sup>29</sup> “Menangani Arus Pendatang”, [https://www.tatsachen-ueber-deutschland.de /id/kategori /masyarakat/menangani-arus-pendatang](https://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/id/kategori/masyarakat/menangani-arus-pendatang), diakses pada tanggal 28 November 2018.

<sup>30</sup> “Imigran dan Kekerasan Sayap Kanan di Jerman”, <http://parstoday.com/id/news/world-i17575-imigran-dan-kekerasan-sayap-kanan-di-jerman>, diakses pada tanggal 28 November 2018.

Memburuknya krisis pengungsi telah meningkatkan ancaman serangan teror oleh kubu sayap kanan dan kemungkinan terbentuknya kelompok-kelompok sayap kanan yang siap melancarkan serangan terror.<sup>31</sup> Tekanan untuk mengusir pengungsi dari Jerman meningkat menyusul serangan teror terbaru di negara itu. Dalam beberapa kasus serangan itu melibatkan pengungsi.

Serangan terhadap pengungsi meningkat ketika tahun 2015 terdapat lebih dari 1,2 juta imigran tiba di Jerman. Terkait serangan kelompok sayap kanan terhadap kamp-kamp pengungsi, Menteri Dalam Negeri Jerman, Thomas de Maiziere mengatakan kejahatan kekerasan bermotivasi politik oleh aktivis sayap kanan meningkat lebih dari 40 persen pada tahun 2015. Serangan terhadap kamp-kamp pengungsi naik menjadi 1031 kasus, dibandingkan dengan 199 pada tahun 2014, di mana 923 dari mereka oleh kelompok sayap kanan.<sup>32</sup>

Belasan kasus pelecehan seksual terhadap perempuan Jerman terjadi pada malam pergantian tahun 2015. Kasus tersebut terjadi di depan stasiun Köln saat ribuan orang berdesak-desakan mengikuti malam pergantian tahun. Menurut sumber berita, seorang perempuan muda dikerubungi oleh belasan hingga puluhan laki-laki berparas timur. Para pelaku melakukan penjarahan barang berharga dan melakukan pelecehan seksual hingga pemerkosaan. Kasus tersebut menambah sentimen negatif masyarakat Jerman, terutama ekstrimis kanan terhadap keberadaan pengungsi di Jerman.<sup>33</sup>

Melihat kondisi yang seperti tersebut, perlu dikeluarkan kebijakan yang dapat membantu Jerman untuk keluar dari krisis pengungsi sehingga konflik antara pengungsi dan penduduk Jerman, baik itu demonstrasi, ancaman terror dan kekerasan dapat dikurangi. Oleh karena itu pada awal tahun 2016 digagas pembentukan Undang-undang Integrasi yang baru. Undang-undang Integrasi tersebut diharapkan dapat membantu Jerman untuk keluar dari krisis pengungsi sehingga konflik di dalam negeri

---

<sup>31</sup>*Ibid*

<sup>32</sup>*Ibid*

<sup>33</sup>“Kasus Pelecehan Seksual di Köln Picu Sentimen Anti Pengungsi” <http://www.dw.com/id/kasus-pelecehan-seksual-di-k%C3%B6ln-picu-sentimen-antipengungsi/a-18962771>, diakses pada tanggal 28 November 2018.

Jerman dapat berkurang.

Undang-undang Integrasi Pengungsi yang baru berisi tentang perubahan prosedur pemberian suaka bagi pengungsi dan keharusan bagi pengungsi untuk mengintegrasikan diri ke dalam Jerman. Perubahan prosedur pengajuan suaka diperketat, meliputi wawancara secara personal bagi pengungsi dan pemeriksaan dokumen pribadi. Tujuannya adalah agar pengungsi yang memiliki catatan kriminal tidak dapat tinggal lebih lama di Jerman. Selain itu, dengan adanya Undang-undang Integrasi tersebut maka proses pendeportasian pengungsi yang melakukan pelanggaran hukum menjadi lebih cepat.

Berikut tersebut merupakan perubahan dalam proses pengajuan suaka di Jerman setelah diberlakukannya Undang-undang Integrasi Pengungsi:

- a. Pencari suaka di daerah perbatasan atau yang ditemukan di dalam teritorial Jerman akan diizinkan untuk masuk ke dalam negara Jerman. Para pencari suaka akan ditempatkan di negara bagian terdekat dari tempat mereka ditemukan.
- b. Pengungsi yang mengajukan suaka akan diarahkan untuk menyiapkan dokumen untuk mengajukan suaka. Selanjutnya permohonan suaka mereka akan diserahkan ke Kantor Federal untuk Migrasi dan Pengungsi yaitu *Bundesamt für Migration und Flüchtlinge* (BAMF) yang berwenang di daerah tersebut untuk pemeriksaan dan pengambilan keputusan. Apabila pemeriksaan dokumen dinyatakan lulus maka pencari suaka akan mendapatkan sertifikat untuk izin tinggal di Jerman selama prosedur suaka berlangsung.
- c. Bagian khusus *Bundesamt für Migration und Flüchtlinge* (BAMF) akan menanyakan kepada pencari suaka tentang rute perjalanan yang mereka tempuh untuk mencapai negara Jerman dan alasan mereka meninggalkan negara asal. Pada prosedur tersebut, pencari suaka perempuan diperbolehkan untuk diwawancarai oleh pewawancara wanita dengan alasan khusus. Keputusan dari pengajuan aplikasi suaka didasarkan pada tahap wawancara dan penyelidikan lebih lanjut terhadap latar belakang pengungsi. Pencari suaka akan diberikan

pengumuman keputusan secara tertulis dan diberi informasi tentang upaya hukum selanjutnya.

- d. Jika aplikasi suaka diterima maka pengungsi akan diberikan status pengungsi. Orang-orang dengan status suaka akan diberikan izin tinggal sementara dan diberikan status yang sama dengan warga negara Jerman. Mereka berhak atas asuransi sosial, kesejahteraan, tunjangan anak, tunjangan untuk integrasi, kursus bahasa, dan bantuan lainnya demi kepentingan integrasi.
- e. Apabila suaka ditolak maka *Bundes Amt fur Migration und Fluchtlinge* (BAMF) dapat mengambil opsi melakukan peninjauan lebih lanjut tentang kemungkinan alasan lain untuk mempertahankan pengungsi. Tujuan dari prosedur tersebut adalah untuk memastikan apakah ada tidaknya prosedur yang salah. Dalam peraturan, pencari suaka yang aplikasinya ditolak akan diminta untuk meninggalkan negara Jerman atau dideportasi segera.<sup>34</sup>

Sejak Undang-undang Integrasi Pengungsi diberlakukan, proses pendeportasian pengungsi bermasalah dipercepat. Peter Altmaier, Kepala Staf Kanselir Angela Merkel mengatakan bahwa hampir setengah dari 700.000 permintaan suaka yang dibuat pada tahun 2016 telah ditolak dan angka tersebut akan meningkat pada tahun 2017. Sebanyak 80.000 pengungsi dideportasi dari Jerman karena kasus hukum dan penolakan aplikasi suaka.<sup>35</sup> Bagi para pengungsi yang terbukti bersalah telah melakukan kejahatan termasuk pelecehan seksual, pemerintah akan menerapkan tindakan tegas dan tidak segan untuk mendeportasi mereka. Pengecualian pada tindakan hukum pidana berat akan tetap diproses sesuai hukum yang berlaku. Proses pendeportasian pengungsi dilakukan dengan cepat karena apabila tidak dilakukan secepat mungkin maka kredibilitas Jerman sebagai negara berdaulat dan patuh hukum

---

<sup>34</sup>“Asylum and Refugees Policy in Germany”, [http://www.bmi.bund.de//Topics/Migration - Integration/Asylum-Refugee-Protection/Asylum-RefugeeProtection\\_Germany/asylum-refugee-policy-germany\\_node.html](http://www.bmi.bund.de//Topics/Migration_Integration/Asylum-Refugee-Protection/Asylum-RefugeeProtection_Germany/asylum-refugee-policy-germany_node.html), diakses pada tanggal 28 November 2018.

<sup>35</sup>“Jerman Deportasi 80.000 Pengungsi di Tahun 2016”, <http://www.voa-islam.com /read/world-news/2017/02/20/49001/jerman-deportasi-80000-pengungsi-di-tahun2016/#sthash.YsZyWdh4.dpbs> , diakses pada tanggal 28 November 2018.

akan tercoreng. Selain itu, dengan mempercepat deportasi pengungsi ke negara asal akan membuat dukungan publik terhadap Undang-undang Integrasi tetap tinggi. Hal tersebut akan menciptakan kestabilan sosial antara pengungsi dan masyarakat Jerman sehingga angka kekerasan antara keduanya dapat berkurang dan kedaulatan Jerman dapat terjaga.

### C. Kepentingan *Economic Well Being*

#### C.1 Ekonomi dan Demografi Negara Jerman

Jerman adalah negara terbuka yang menunjukkan cara hidup pluralisme. Dengan penduduk yang berjumlah sekitar 80,7 juta orang, Jerman merupakan negara anggota Uni Eropa (UE) yang paling banyak penduduknya. Negara yang modern dan terbuka tersebut telah berkembang menjadi negara imigrasi penting. Lebih dari 16,4 juta orang di Jerman mempunyai riwayat pascamigrasi. Jerman termasuk negara yang peraturan imig-rasinya paling liberal. Menurut hasil studi *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) dari tahun 2014, Jerman merupakan negara yang paling banyak dituju oleh migran setelah Amerika Serikat.<sup>36</sup>

Ciri yang tampak dalam masyarakat di Jerman adalah pluralisme gaya hidup serta keanekaragaman etnik budaya.<sup>37</sup> Keadaan sehari-hari masyarakat dapat berubah dikarenakan pengaruh gaya hidup dan kenyataan hidup yang baru. Dengan adanya para pendatang dapat memberikan kontribusi bagi negara dengan perspektif dan pengalaman yang baru. Masyarakat bersikap terbuka dan toleran terhadap cara hidup yang serta orientasi yang berbeda.

Tabel 4.1  
Data Kependudukan Negara Jerman Tahun 2016

Populasi	80,722,792 (sejak Juli 2016.)
Struktur Usia	<b>0-14 tahun:</b> 12.83% (pria 5,317,183/wanita 5,040,664) <b>15-24 tahun:</b> 10.22% (pria 4,203,985/wanita 4,044,789) <b>25-54 tahun:</b> 40.96% (pria 16,721,667/wanita

<sup>36</sup> “Keanekaragaman Yang Mengayakan”, <https://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/id/kategori/masyarakat/keanekaragaman-yang-mengayakan>, diakses pada tanggal 29 November 2018.

<sup>37</sup> *Ibid.*

	16,345,911) <b>55-64 tahun:</b> 14.23% (pria 5,695,117/ wanita 5,788,493) <b>lebih dari 65 tahun:</b> 21.76% (pria 7,709,799/wanita 9,855,184)
Rasio Ketergantungan	<b>Total Rasio Ketergantungan:</b> 51.8% <b>Rasio Ketergantungan Usia Muda:</b> 19.6% <b>Rasio Ketergantungan Lansia:</b> 32.2% <b>Rasio Pendukung Potensial:</b> 3.1% (sejak 2015)
Usia Median	<b>total:</b> 46.8 tahun <b>pria:</b> 45.7 tahun <b>wanita:</b> 47.9 tahun (sejak 2016)
Kecepatan Pertumbuhan populasi	-0.16% (sejak 2016)
Kecepatan Kelahiran	8.5 kelahiran/1,000 populasi (sejak 2016)
Kecepatan Kematian	11.6 kematian/1,000 populasi (sejak 2016)
Tingkat Migrasi Bersih	1.5 migrasi/1,000 populasi (sejak 2016)
Urbanisasi	<b>Populasi urbanisasi:</b> 75.3% of total populasi (2015) <b>Kecepatan urbanisasi:</b> 0.16% tingkat perubahan tahunan (2010-15 est.)
Populasi Kota Besar	BERLIN (ibu kota) 3.563 juta; Hamburg 1.831 juta; Munich 1.438 juta; Cologne 1.037 juta (2015)
Ratio jenis kelamin	<b>Kelahiran:</b> 1.06 pria/wanita <b>0-14 tahun:</b> 1.05 pria/wanita <b>15-24 tahun:</b> 1.04 pria/wanita <b>25-54 tahun:</b> 1.02 pria/wanita <b>55-64 tahun:</b> 0.98 pria/wanita <b>diatas 65 tahun:</b> 0.78 pria/wanita <b>total populasi:</b> 0.78 pria/wanita (sejak 2016)
Usia rata-rata ibu pada saat pertama kali melahirkan	29.2 (2012 est.)

Sumber : Departemen Statistik Jerman 2016



Menurut analisa statistika yang dikeluarkan oleh Departemen Statistik Jerman pada tahun 2016 (lihat tabel 4.1), di Jerman hidup 80,7 juta jiwa dengan rincian 48,6 juta adalah perempuan dan 32,1 juta laki-laki. Mayoritas penduduk di Jerman, sekitar 75 juta jiwa, memegang paspor Jerman. Sekitar seperlima di antaranya memiliki latar belakang migrasi, artinya baik ia, orangtuanya ataupun sanak saudaranya datang ke Jerman untuk bermigrasi, sebagai pendatang ataupun dalam rangka mencari suaka. Kurang dari 10 persen penduduk Jerman adalah mereka yang tidak berkebangsaan Jerman atau tidak memegang paspor Jerman.

Terdapat 43 juta jiwa diantaranya berada dalam kisaran usia kerja. 10 persen di antaranya adalah wiraswasta dan sekitar 36 juta jiwa bekerja sebagai pegawai. Penyedia lapangan kerja rata-rata berasal dari sektor pelayanan atau jasa, diikuti oleh sektor industri serta sektor pembangunan dan konstruksi. Berikutnya adalah sektor pemerintahan yaitu sekitar 4,5 juta jiwa bekerja sebagai pegawai negeri. Menurut data statistik tahun 2014 terdapat kira-kira 3,4 juta jiwa yang menganggur.<sup>38</sup>

Menilik usia penduduk Jerman, hampir 75% atau 61 juta jiwa berusia lebih dari 25 tahun ke atas. Menurut data statistika diatas, berdasarkan usia, semakin muda usia maka semakin sedikit jumlahnya. Jerman memiliki sedikit sekali jumlah anak, hanya terdapat sekitar 10 juta jiwa penduduk yang berusia di bawah 14 tahun dan 6 juta diantaranya berusia kurang dari 6 tahun. Penduduk lajang merupakan mayoritas di Jerman, yaitu sekitar 46 juta jiwa baik yang belum menikah ataupun yang bercerai.

Menurut analisa tabel statistik diatas, Jerman adalah salah satu negara dengan tingkat pertumbuhan penduduk rendah diantara negara-negara Uni Eropa (UE). Berdasarkan data statistika yang dikeluarkan oleh Badan Statistika Jerman, pada tahun 2016 bahkan pertumbuhan penduduk Jerman menyentuh angka -0,16 % yang artinya tidak terjadi pertumbuhan penduduk pada tahun tersebut. Hal tersebut dikarenakan

---

<sup>38</sup> Birgitz Gortz, "Jerman dalam Statistik", <http://www.dw.com/id/jerman-dalam-statistik/a-5505934>, diakses pada tanggal 29 November 2018.

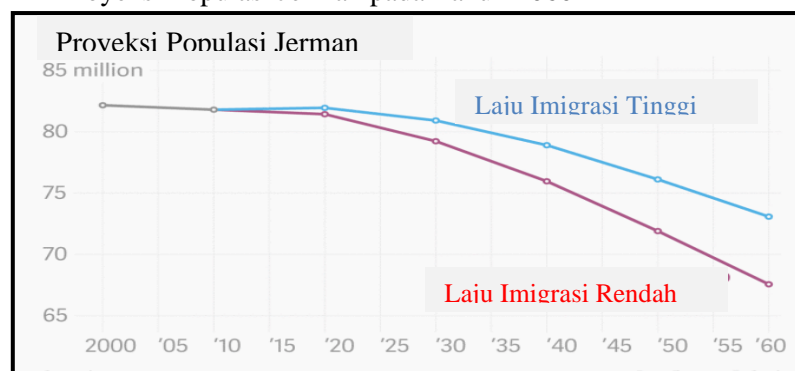
rasio kematian di Jerman lebih besar dari pada rasio kelahiran. Berdasarkan data penduduk Jerman, rasio kelahiran rata-rata di Jerman yaitu 1,4 anak/wanita.

Luas wilayah negara bagian terbesar di Jerman adalah Bayern, diikuti oleh Niedersachsen dan Baden-Württemberg. Nordrhein-Westfalen adalah negara bagian dengan jumlah penduduk terbanyak. Wilayah paling padat penduduknya adalah wilayah ibukota Berlin. Di Berlin tinggal sekitar 3.800 jiwa penduduk per kilometer persegi. Berbeda halnya dengan Mecklenburg-Vorpommern yang setiap kilometer persegi hanya di diami oleh sekitar 72 penduduk.<sup>39</sup>

## C.2 Permasalahan Ekonomi dan Demografi Negara Jerman

Selama bertahun-tahun jumlah penduduk Jerman diprediksi akan menyusut. Kantor Statistik Federal dan Institut Federal Penelitian Populasi berpendapat bahwa angka kelahiran yang terus menurun dan jumlah imigrasi yang rendah sebagai alasan utama untuk hal tersebut. Jika tingkat kelahiran tetap konstan pada 1,4 anak per wanita dan imigrasi mencapai 100.000 orang per tahun, maka pada 2060 Jerman hanya memiliki penduduk sekitar 68 hingga 73 juta jiwa saja. Pada tahun 2060, penduduk Jerman akan berkurang sekitar 8 hingga 15 juta jiwa.<sup>40</sup>

Gambar 4.1  
Proyeksi Populasi Jerman pada Tahun 2060



Sumber : Departemen Statistik Jerman 2016

<sup>39</sup> Birgitz Gortz, *Op.cit.*

<sup>40</sup> Henry Chu, "For Germany, refugees are a demographic blessing as well as a burden", [http:// www.1atimes.com/ world/europe/la-fg-germany-refugees-demographics-20150910-story.html](http://www.1atimes.com/world/europe/la-fg-germany-refugees-demographics-20150910-story.html), diakses pada tanggal 29 November 2018.

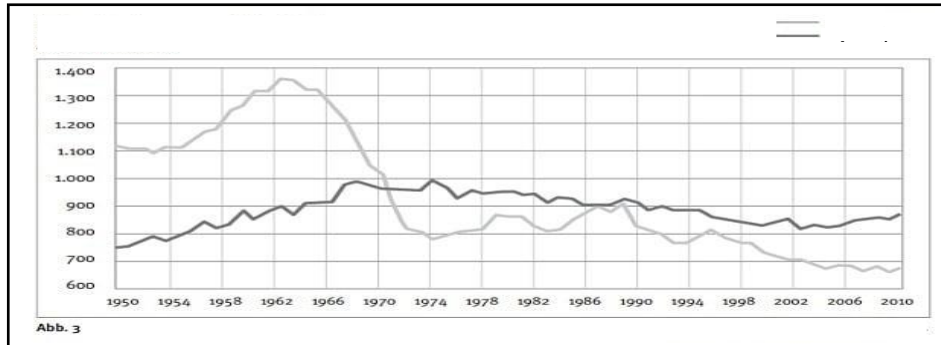
Menurut data di atas, Jerman kehilangan jutaan jiwa rakyatnya selama Perang Dunia II. Hal tersebut menjadi permasalahan yang serius karena berdasarkan data Badan Statistika Jerman, perempuan di Jerman tidak mempunyai *rate of birth* atau angka kelahiran yang cukup untuk membuat angka pertumbuhan penduduk Jerman menjadi positif. Artinya yaitu dengan tidak adanya angka kelahiran yang cukup maka di Jerman tidak terjadi pertumbuhan penduduk selama kurun waktu tertentu.

Menurut sebuah laporan yang dikeluarkan oleh Institusi Ekonomi Dunia di Humburg Jerman yaitu *Humburgisches Welt Wirtschafts Institut* (HWWI), Jerman adalah negara industri dengan tingkat kelahiran terendah di dunia. Kanselir Angela Merkel berpendapat bahwa apabila hal tersebut dibiarkan terus terjadi maka pada tahun 2020 Jerman akan kehilangan jaringan enam juta pekerja pada kurun 15 tahun berikutnya.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Vincent Cooper, "Germany's Demography and Economy Collapse". [http://www.thecommentator.com/article/5907/germany\\_s\\_demographic\\_and\\_economic\\_illapse](http://www.thecommentator.com/article/5907/germany_s_demographic_and_economic_illapse), diakses pada tanggal 29 November 2018.

Gambar 4.2  
Perbandingan Angka Kelahiran dan Kematian di Jerman



Sumber : Statistisches Bundesamt & HWWI, 2013

*Hamburgisches Welt Wirtschafts Institut* (HWWI) merilis sebuah laporan bahwa angka kelahiran di Jerman yaitu 8,2 per 1000 orang. Angka tersebut berada di bawah batas kritis dari angka kelahiran normal sebuah negara maju yaitu 2,1 per wanita. Laporan di atas menunjukkan bahwa masalah pertumbuhan penduduk merupakan masalah yang sangat serius bagi Jerman karena Jerman tidak dapat mengandalkan pertumbuhan penduduk asli mereka. Laporan tersebut mengklaim bahwa beberapa kota kecil di Jerman mungkin harus menutup usaha mereka dikarenakan tidak adanya penduduk usia produktif.<sup>42</sup> Pada tahun 2030 diperkirakan rasio pekerja / penduduk yang memasuki usia pensiun akan menjadi 1:1. Rasio yang tidak berkelanjutan tersebut akan membuat sistem usaha di Jerman akan mengalami keruntuhan.

Di negara dengan sistem sosial yang kuat seperti Jerman, negara bergantung pada tenaga kerja usia muda. Pengungsi merupakan solusi untuk membantu memperlambat penurunan pendapatan negara dari pajak yang dihasilkan dari rendahnya angka kelahiran di Jerman. Keberadaan pengungsi akan menjadi solusi cepat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Perbedaan demografi yang jauh antara penduduk usia muda dan tua memberikan peluang bagi pengungsi untuk mengambil peran didalamnya. Pada

---

<sup>42</sup> *Ibid.*

tahun 2013 terdapat 15,1 juta orang Jerman di atas usia 67 tahun. Angka itu diperkirakan akan meningkat tajam menjadi 21,5 juta pada 2040 atau naik 42 %. Selama jangka waktu yang sama, penduduk dengan usia antara 20 sampai 66 berkurang hampir seperempat dengan 13 juta lebih sedikit pada tahun 2040 dibandingkan dengan tahun 2013. Jerman membutuhkan setidaknya 500.000 jiwa pengungsi yang bergabung sebagai wajib pajak setiap tahunnya untuk mengimbangi penurunan tersebut.<sup>43</sup>

Hingga akhir tahun 2015 Jerman masih mencari solusi yang tepat dan cepat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Menurut salah satu pakar yang dikutip dalam *Deutsche Welle* (DW) tahun lalu, ekonomi Jerman perlu menarik 1,5 juta pengungsi yang terampil untuk menstabilkan sistem pensiun negara seiring dengan semakin banyaknya penduduk yang pensiun. Masuknya para pengungsi dengan usia produktif mampu memperbaiki rasio *dependency*, yaitu suatu ukuran yang membandingkan antara penduduk berusia 65 tahun dengan penduduk usia kerja berusia 15 hingga 64 tahun.<sup>44</sup> Salah satu peluang untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan memanfaatkan pengungsi/pencari suaka dengan diberlakukannya Undang-undang Integrasi Pengungsi. Diharapkan dengan adanya Undang-undang tersebut maka pengungsi dapat mempunyai keahlian yang dapat digunakan untuk bekerja dan bekerjasama dengan negara Jerman, sehingga memberikan pemasukan pajak bagi Jerman.

### **C.3 Peranan Undang-undang Integrasi Pengungsi bagi Permasalahan Demografi dan Ekonomi Negara Jerman**

Perekonomian Jerman akan bertambah sehat dengan masuknya ratusan ribu pengungsi, antara lain dalam bentuk surplus penerimaan negara dari pembayaran pajak mereka. Tidak seperti retorika para anti-imigran atau anti-pengungsi yang menganggap para pengungsi akan menguras sumber daya ekonomi, kehadiran para pengungsi

---

<sup>43</sup> Eben E. Siadari, “Masuknya Ribuan Migran Unungkan Ekonomi Jerman”, <http://www.satuharapan.com/read-detail/read/studi-masuknya-ribuan-migran-untungan-ekonomi-jerman>, diakses pada tanggal 29 November 2018.

<sup>44</sup> *Ibid.*

tersebut justru diperkirakan memberi dampak positif dan bersih terhadap perekonomian.

Studi yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Ekonomi Eropa yaitu Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) untuk *Bertelsman Foundation* yang dipublikasikan November 2014, menunjukkan sebanyak 6,6 juta penduduk Jerman berkewarganegaraan asing pada 2012 membayar 147,9 miliar euro lebih banyak (dalam bentuk pajak dan asuransi sosial) ketimbang yang mereka terima dalam bentuk transfer sosial, dalam sisa hidup mereka.<sup>45</sup>

Menurut laporan itu, penduduk berkewarganegaraan asing menghasilkan surplus 22 miliar euro pada tahun 2012 bagi keuangan Jerman. Dalam jangka panjang, banjir pengungsi yang melanda Jerman diharapkan akan menghasilkan keuntungan yang sama.

Jerman membutuhkan tenaga muda untuk mengatasi gelombang jutaan pensiunan. Sekitar sepertiga rata-rata dari 1 juta pengungsi yang masuk Jerman pada tahun 2015 berada pada usia dibawah 25 tahun<sup>46</sup> sehingga diharapkan akan membantu perekonomian Jerman. Dibutuhkan sebuah sistem integrasi yang memadai agar nantinya para pengungsi dapat memberikan manfaat yang diharapkan oleh Jerman. Pada jangka pendek integrasi pengungsi akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit bagi Jerman, namun dalam jangka waktu yang panjang akan membuat perekonomian Jerman menjadi lebih baik.

Sejalan dengan pemikiran tersebut, sebuah penelitian terbaru dari Institut Riset Ekonomi Jerman yaitu *Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung* (DIW) merilis sebuah laporan bahwa melalui diberlakukannya Undang-undang Integrasi Pengungsi akan membawa dampak positif bagi arus masuk pengungsi bagi ekonomi Jerman. Studi tersebut menyimpulkan bahwa integrasi pengungsi akan memberikan

---

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> Marcel Fratzscher and Simon Junker, "Integration von Flüchtlingen – eine langfristig lohnende Investition", [http://www.diw.de/sixcms/detail.php?id=diw\\_01.c.518260.de](http://www.diw.de/sixcms/detail.php?id=diw_01.c.518260.de), diakses pada tanggal 29 November 2018.

keuntungan jangka panjang bagi ekonomi Jerman.<sup>47</sup> Komisi Ekonomi Eropa berpandangan bahwa dampak integrasi pengungsi melalui Undang-undang Integrasi Pengungsi bagi perekonomian Jerman pada tahun 2020 berkisar antara 0,2-0,3 persen dari PDB (*Protein Data Bank*) Jerman. Namun angka tersebut diasumsikan apabila keterampilan kerja pengungsi berkisar antara rendah ke sedang. Sehingga apabila keterampilan pengungsi ditingkatkan maka akan membantu meningkatkan persentase tersebut.

Pendapat di atas didukung oleh hasil survey dari Badan Pengungsi dari badan Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) yaitu *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) bahwa hampir sembilan dari sepuluh pengungsi Suriah yang tiba di Yunani dan akan melanjutkan perjalanan ke Jerman mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi dengan 43% memegang gelar sarjana dan 43 % lainnya memegang ijazah sekolah tinggi.<sup>48</sup> Hampir delapan dari sepuluh pengungsi Suriah yang di survey (78%) berumur dibawah 35 tahun.

Dampak pengungsi bagi ekonomi Jerman tergantung pada seberapa baik mereka mengintegrasikan diri kedalam pasar tenaga kerja Jerman. Walaupun Jerman mengetahui negara asal, usia, dan tingkat pendidikan pengungsi, Jerman tidak mengetahui seperti apa kurikulum di sekolah dan universitas para pengungsi dibandingkan dengan kurikulum Jerman.

Jerman juga tidak memiliki pengetahuan khusus mengenai seberapa besar kemampuan dan keinginan para pengungsi untuk belajar bahasa Jerman dan mengintegrasikan dirinya sendiri ke pasar tenaga kerja.

Terdapat lima faktor yang mempengaruhi integrasi pengungsi ke pasar tenaga kerja, yaitu:<sup>49</sup>

1. Bahasa

---

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> UNHCR, "Syrian Refugee Arrivals in Greece: Preliminary Questionnaire Findings", <http://www.unhcr.org/5666ddda6.html>, diakses pada tanggal 29 November 2018.

<sup>49</sup> "Wie klappt's in der Praxis?", <http://www.tagesschau.de/inland/integration-107.html>, diakses pada tanggal 29 November 2018.

Integrasi akan sukses bergantung pada pembelajaran bahasa Jerman. Mendapatkan dan mempertahankan pekerjaan, bahkan meningkatkan karir di dunia kerja tergantung pada kemampuan pengungsi berkomunikasi dalam bahasa Jerman. Keterampilan bahasa tidak hanya mencakup kemampuan dasar bahasa Jerman, namun mencakup bahasa dalam profesi tertentu.

## 2. Tingkat Pendidikan dan Keterampilan Kerja

Pasar tenaga kerja Jerman membutuhkan pekerja terampil, beberapa lulusan universitas, beberapa dengan pendidikan kejuruan atau teknis. Pengungsi yang mempunyai kualifikasi di atas terutama keterampilan sesuai yang dibutuhkan oleh pasar tenaga kerja mempunyai kesempatan yang lebih besar dalam menemukan pekerjaan dan mengintegrasikan diri kedalamnya. Pengungsi tanpa tingkat pendidikan yang memadai perlu mengejar ketinggalan dengan kembali ke sekolah dan meningkatkan keterampilan melalui program pelatihan keterampilan.

## 3. Hak untuk Bekerja

Sebelum diberlakukannya Undang-undang Integrasi Pengungsi, pengungsi membutuhkan waktu tiga bulan untuk dapat berpartisipasi kedalam pasar tenaga kerja Jerman.

## 4. Keterbukaan Pasar Kerja

Tanpa adanya kesediaan para pengusaha dan pemerintah Jerman untuk mempekerjakan pengungsi maka integrasi pengungsi ke dalam pasar tenaga kerja akan percuma.

## 5. Pengakuan Kualifikasi

Pengungsi perlu melakukan langkah tambahan agar keterampilan mereka diakui sebelum mereka diizinkan untuk bekerja. Pengakuan kualifikasi tersebut bertujuan untuk melindungi masyarakat Jerman, terutama bagi profesi berlisensi seperti dokter dan petugas kesehatan. Untuk mengetasi hal tersebut Jerman mengeluarkan hukum dasar yang disebut *Recognition Act of 2012*. Melalui hukum tersebut, dibutuhkan waktu maksimal tiga bulan untuk memberikan sertifikasi bagi pengungsi yang mengajukan



pengakuan kualifikasi.<sup>50</sup> Namun proses tersebut dianggap terlalu panjang dan sulit. Proses yang panjang dan sulit tersebut dikhawatirkan akan menyebabkan ketergantungan pengungsi terhadap pemerintah Jerman.

Sebenarnya, sebelum diberlakukannya Undang-undang Integrasi Pengungsi pemerintah Jerman telah mempunyai landasan hukum yang memuat kebijakan dan program yang membantu pengungsi yang masih tergolong luas dan masih dikategorikan imigran secara umum dalam berintegrasi dan mengatasi lima tantangan tersebut. Tapi kebanyakan dari kebijakan tersebut dianggap kurang efektif untuk mengatasi gelombang pengungsi yang masuk ke negara Jerman. Untuk mengatasi hal tersebut maka pemerintah Jerman melegalisasi Undang-undang Integrasi Pengungsi yang terbaru tersebut. Undang-undang tersebut membuat pemerintah lebih berperan aktif dalam Integrasi pengungsi ke dalam pasar tenaga kerja. Kebijakan yang terdapat di dalam Undang-undang Integrasi Pengungsi antara lain<sup>51</sup> :

#### 1. Kursus Bahasa

Pencari suaka akan diizinkan untuk mengajukan kursus bahasa enam minggu setelah tiba di Jerman (dibandingkan dengan tiga bulan sebelumnya) dan terlepas dari apakah aplikasi suaka mereka telah diproses. Pemerintah setidaknya menyediakan 600 jam kelas bahasa untuk pendatang baru. Selain itu, pemerintah menggabungkan pelatihan bahasa profesi tertentu untuk belajar terminologi khusus.

#### 2. Kursus Integrasi

Kursus tentang budaya Jerman, masyarakat dan nilai-nilai akan diperluas dari 60 jam sampai 100 jam. Jumlah slot yang tersedia untuk kursus integrasi akan meningkat dari 20.000 menjadi 200.000 secara nasional.

#### 3. Program Kerja

Pemerintah akan menciptakan 100.000 pekerjaan berupah rendah membayar sekitar satu euro per jam yang ditujukan bagi para pengungsi dengan keterampilan

---

<sup>50</sup> “Federal Ministry of Education and Research: Recognition in Germany”, [https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/en/success\\_stories.php](https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/en/success_stories.php), diakses pada tanggal 29 November 2018.

<sup>51</sup> Soern Kern, *Loc.cit.*

rendah.

#### 4. Hukum Perburuhan

Melalui kebijakan tersebut pengungsi akan mendapatkan kesetaraan hak untuk bekerja apabila mempunyai keterampilan dan kualifikasi yang sama dengan warga negara Jerman dan warga Uni Eropa (UE). Artinya adalah sebuah perusahaan Jerman dapat merekrut pengungsi dengan kualifikasi yang sama dengan warga asli Jerman untuk menduduki posisi yang diperebutkan. Selain itu, melalui kebijakan tersebut pengungsi akan diberikan kemudahan dalam proses untuk pengakuan kualifikasi keterampilan.

#### 5. Keterbukaan Pasar Kerja

Kebijakan tersebut akan mendorong para penyedia lapangan kerja untuk lebih terbuka bagi para pengungsi. Melalui kebijakan tersebut para pengusaha Jerman telah menunjukkan peningkatan keterbukaan untuk memperkerjakan pengungsi. Selain itu, pengusaha juga meluncurkan berbagai terobosan untuk mengintegrasikan pengungsi ke dalam tenaga kerja mereka. Seperti halnya produsen mobil multinasional seperti *Porsche* dan *Daimler* menawarkan program pelatihan kejuruan bagi para pengungsi.<sup>52</sup>

Dampak diberlakukannya Undang-undang Integrasi pengungsi bagi perekonomian Jerman dapat dilihat dari rilis laporan yang dipublikasikan oleh *International Monetary Fund* (IMF) pada awal tahun 2017. Berdasarkan publikasi *International Monetary Fund* (IMF), dengan adanya integrasi pengungsi ke dalam pasar tenaga kerja Jerman melalui Undang-undang Integrasi Pengungsi meningkatkan *Gross Domestic Product* (GDP) Jerman dari 0,19 persen pada awal tahun 2016 menjadi 0,35 persen pada awal tahun 2017.<sup>53</sup>

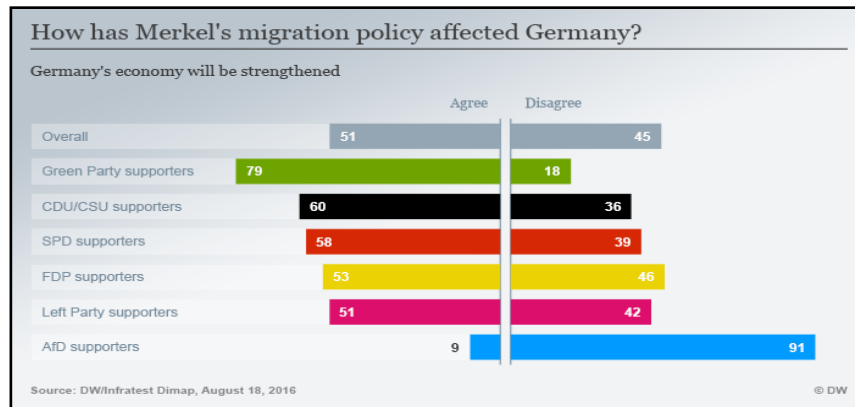
#### Gambar 4.3

---

<sup>52</sup> Wirtschaft Zusammen, “Beispielhafte Integrationsprojekte, Terjemahan” <http://wir-zusammen.De/patenschaften>, diakses pada tanggal 29 November 2018.

<sup>53</sup> Georgi Gotev, “Refugees Can Bring Significant Economic Benefits”, <http://www.euractiv.com/section/euro-finance/news/refugees-can-bring-significant-economic-benefit-report/>, diakses pada tanggal 29 November 2018.

## Hasil Survey Pengaruh Pengungsi bagi Ekonomi Jerman



Selain itu pada pertengahan tahun 2016, sejauh mana Undang-undang Integrasi Pengungsi mampu mengubah Jerman adalah melalui berita yang dikeluarkan oleh Kantor berita *Deutsche Welle* (DW) mengadakan jajak pendapat lewat kerjasama dengan salah satu institut riset di Jerman yaitu *Infratest Dimap*. Sekitar seribu orang yang punya hak memberikan suara dalam pemilu ikut jajak pendapat antara 15 dan 17 Agustus 2016. Empat pernyataan jadi fokusnya, dan orang menjawab setuju atau tidak setuju.

Hasilnya dijabarkan berdasarkan partai politik. Sebagai acuan, Kanselir Merkel adalah Ketua Partai Kristen Demokrat atau *Christian Democratic Union* (CDU) yang beraliansi dengan Partai Kristen Sosialis atau *Christian Social Union* (CSU).<sup>54</sup> Dari hasil suvey diketahui bahwa lebih dari 50 persen partai di Jerman berpendapat bahwa adanya Undang-undang Integrasi Pengungsi akan membuat ekonomi Jerman akan semakin kuat kedepannya.

### KESIMPULAN

Pada bagian akhir skripsi ini, penulis akan memaparkan beberapa kesimpulan yang dapat diambil dan saran yang didasarkan pada temuan hasil penelitian. Secara umum penulis menyimpulkan bahwasannya kepentingan Jerman dalam melegalisasi Undang-

<sup>54</sup> Sabine Kinkartz, "Jerman Untung Karena Politik Pembukaan Diri bagi Pengungsi?", <http://www.dw.com/id/jerman-untung-karena-politik-pembukaan-diri-bagi-pengungsi/a-19492144>, diakses pada tanggal 29 November 2018.

undang integrasi pengungsi di era Kanselir Angela Merkel adalah untuk kepentingan nasional Jerman. Hal ini menjadi dasar bagi para pembuat keputusan untuk memutuskan politik baik di dalam negeri maupun kebijakan politik luar negeri. Kepentingan nasional yang menjadi peran besar Jerman dalam melegalisasi undang-undang tersebut adalah kepentingan untuk mempertahankan diri atau *self preservation*, kepentingan teritori dan sumber daya atau *territory integrity*, serta kepentingan ekonomi atau *economic well being*.

#### A.1 *Self Preservation*

Legalisasi Undang-undang Integrasi Pengungsi merupakan jawaban Kanselir Angela Merkel perihal krisis pengungsi. Kebijakan Angela Merkel tersebut mengambil peran penting bagi pemerintahan dalam menghadapi krisis penolakan kebijakan *welcome refugees* yang terjadi di negara Jerman, baik dari masyarakat ataupun partai oposisi. Undang-undang Integrasi Pengungsi tersebut mulai diberlakukan pada tanggal 6 Agustus 2017. Angela Merkel menaruh harapan besar terhadap pemberlakuan Undang-undang Integrasi pengungsi tersebut untuk menjaga kestabilan politik dalam negeri Jerman.

Ada beberapa point penting dalam Undang-undang Integrasi tersebut, point utama adalah pengungsi wajib mempelajari sosial budaya Jerman, utamanya adalah bahasa Jerman agar nantinya pengungsi dapat lebih mudah dalam berkomunikasi dan bersosialisasi dengan masyarakat Jerman. Masyarakat Jerman beranggapan bahwa sebuah hal yang wajar jika pengungsi belajar bahasa Jerman, menghormati nilai kebebasan dan demokrasi. Undang-undang tersebut memicu timbulnya rasa sosial yang lebih bagi masyarakat Jerman untuk membantu pengungsi dalam memahami Jerman. Masyarakat Jerman bahu-membahu mengajar bahasa Jerman dan menampung anak-anak tanpa orangtua, atau mencarikan mereka pekerjaan. Di Jerman, tidak seorang pengungsi harus tidur di jalan. Kebanyakan dari mereka (pengungsi) kini berada pada kondisi hidup yang lebih baik. Hal tersebut tidak lepas dari kesediaan penduduk Jerman untuk menampung pengungsi. Penjelasan di atas menunjukkan bahwa pemberlakuan

Undang-undang Integrasi Pengungsi membawa dampak positif bagi moral masyarakat Jerman yang lebih menunjukkan rasa simpati dan peduli.

Keentingan *Self Preservation* yang menyangkut kepentingan Jerman dalam menjaga kestabilan politik baik keamanan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Angela Merkel tercapai melalui legalisasi Undang-undang Integrasi Pengungsi.

#### A.2 *Territory Integrity*

Penulis mendefinisikan kepentingan *territory integrity* bukanlah kepentingan dalam mengamankan daerah teritorial suatu negara. Akan tetapi, yang dimaksud kepentingan *territory integrity* berkaitan dengan legalisasi Undang-undang Integrasi Pengungsi yaitu kepentingan Undang-undang integrasi yang telah dilegalisasi oleh Jerman menunjukkan bahwa Undang-undang tersebut dibuat untuk mengatur pengungsi yang ada di Jerman. Secara tidak langsung, tindakan Jerman dalam melegalkan Undang-undang Integrasi Pengungsi dimaksudkan untuk membuat agar para pengungsi secara tidak langsung menjadi warga negara Jerman tidak lagi berstatus sebagai pengungsi. Sehingga pengertian *integrity* dalam hal tersebut adalah mengintegrasikan orang asing dalam hal tersebut adalah pengungsi. Integritas teritorial dalam hal tersebut bukan merupakan wilayah kedaulatan negara Jerman namun lebih kepada kepentingan Jerman untuk melindungi warga negara dan pengungsi.

#### A.3 *Economic Well Being*

Di negara dengan sistem sosial yang kuat seperti Jerman, negara bergantung pada tenaga kerja usia muda. Pengungsi merupakan solusi untuk membantu memperlambat penurunan pendapatan negara dari pajak yang dihasilkan dari rendahnya angka kelahiran di Jerman. Keberadaan pengungsi akan menjadi solusi cepat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Perbedaan demografi yang jauh antara penduduk usia muda dan tua memberikan peluang bagi pengungsi untuk mengambil peran didalamnya. Pada tahun 2013 terdapat 15,1 juta orang Jerman di atas usia 67 tahun. Angka itu diperkirakan akan meningkat tajam menjadi 21,5 juta pada 2040 atau naik 42 %. Selama jangka waktu yang sama, penduduk dengan usia antara 20 sampai 66 berkurang

hampir seperempat dengan 13 juta lebih sedikit pada tahun 2040 dibandingkan dengan tahun 2013. Jerman membutuhkan setidaknya 500.000 jiwa pengungsi yang bergabung sebagai wajib pajak setiap tahunnya untuk mengimbangi penurunan tersebut.

Hingga akhir tahun 2015 Jerman masih mencari solusi yang tepat dan cepat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Menurut salah satu pakar yang dikutip dalam *Deutsche Welle* (DW) tahun lalu, ekonomi Jerman perlu menarik 1,5 juta pengungsi yang terampil untuk menstabilkan sistem pensiun negara seiring dengan semakin banyaknya penduduk yang pensiun. Masuknya para pengungsi dengan usia produktif mampu memperbaiki rasio *dependency*, yaitu suatu ukuran yang membandingkan antara penduduk berusia 65 tahun dengan penduduk usia kerja berusia 15 hingga 64 tahun. Salah satu peluang untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan memanfaatkan pengungsi/pencari suaka dengan diberlakukannya Undang-undang Integrasi Pengungsi. Diharapkan dengan adanya Undang-undang tersebut maka pengungsi dapat mempunyai keahlian yang dapat digunakan untuk bekerja dan bekerjasama dengan negara Jerman, sehingga memberikan pemasukan pajak bagi Jerman.

Dampak pengungsi bagi ekonomi Jerman tergantung pada seberapa baik mereka mengintegrasikan diri ke dalam pasar tenaga kerja Jerman. Jerman juga tidak memiliki pengetahuan khusus mengenai seberapa besar kemampuan dan keinginan para pengungsi untuk belajar bahasa Jerman dan mengintegrasikan dirinya sendiri ke pasar tenaga kerja.

Dampak diberlakukannya Undang-undang Integrasi pengungsi bagi perekonomian Jerman dapat dilihat dari rilis laporan yang dipublikasikan oleh *International Monetary Fund* (IMF) pada awal tahun 2017. Berdasarkan publikasi *International Monetary Fund* (IMF), dengan adanya integrasi pengungsi ke dalam pasar tenaga kerja Jerman melalui Undang-undang Integrasi Pengungsi meningkatkan *Gross Domestic Product* (GDP) Jerman dari 0,19 persen pada awal tahun 2016 menjadi 0,35 persen pada awal tahun 2017.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- B, Matthias, *Fakta Mengenai Jerman*, Frankfurter Societäts Medien GmbH; Frankfurt am Main atas kerjasama dengan Kementerian Luar Negeri Jerman, Jerman, 2015
- Jaggard, Lyn, *Climate Change Politics in Europe: Germany and the International Relations of the Environment*, Tauris Academic Studies, London, 2007
- Jemadu, Alexius, *Politik Global dalam Teori dan Praktik*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2008
- Masoed, Mohtar, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, PT Pustaka LP3ES, Jakarta, 1994
- Masoed, Mohtar, *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi*, Pusat Antar Universitas: Studi Sosial Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1989
- Morgenthau, Hans Joachim, *Politik Antar Bangsa, Buku Ketiga*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1991
- Plano, Jack. C Olton, *The International Relations Dictionary*, Third Edition, Western Michigan University, ABL-Clio California, 1980
- Warsito, Tulus, *Teori-Teori Politik Luar Negeri, Relevansi dan Keterbatasannya*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 1998
- UNHCR, "Europe Refugees and Migrants Emergency Response: Nationality of Arrivals to Greece, Italy, and Spain", Annual Report, New York, 2015

### Artikel Dalam Buku

- Jaggard, Lyn, "The Reflexivity of Ideas in Climate Change Policy: German, European and International Politics", dalam Paul G. Harris (ed), *Politics, Foreign Policy and Regional Cooperation*, the Education University of Hongkong, Inggris, 2007,

### Jurnal

- Sari, Ani Kartika, "Upaya Uni Eropa Dalam Menangani Pengungsi Dari Negara-Negara Mediterania Selatan di Kawasan Eropa", *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*. Volume 3. No 3, 2015,
- Satrio, Abdurrachman, "Fungsi Legislasi Majelis Tinggi di Indonesia dan Jerman ;Perbandingan Antara DPD dengan Bundesrat", *Jurnal Rechtsvinding*,

### Skripsi

- Chrissandi, Imanuel "Dampak Sikap Jerman Terhadap Krisis Pengungsi Bagi Keamanan Regional Di Eropa", *Tesis FISIP Universitas Hasanuddin*, 2016

### Website

- "9 November 1989: Hari Tak Terlupakan", <http://m.dw.com/id/9-november-1989-hari-tak-terlupakan/a-18047350>, diakses pada tanggal 26 November 2018.
- Aminuddin, Choirul, "Jerman Gelar Bursa Tenaga Kerja Untuk Pengungsi", <https://m.tempo.co/read/news/2016/03/01/117749430/jerman-gelar-bursa-tenaga-kerja-untuk-pengungsi>, diakses pada tanggal 26 November 2018.
- Assegaf, Faisal, "Rute Pengungsi Suriah Hingga Tiba Di Eropa", <http://albalad.co/kabar/2015A3545/rute-pengungsi-suriah-hingga-tiba-di->

- [eropa/](#), diakses pada tanggal 28 November 2018.
- “Asylum and Refugees Policy in Germany”,  
[http://www.bmi.bund.de/EN/Topics/Migration-Integration/Asylum\\_Refugee-Protection/Asylum-Refugee-Protection\\_Germany/asylum\\_refugee-policy-germany\\_node.html](http://www.bmi.bund.de/EN/Topics/Migration-Integration/Asylum_Refugee-Protection/Asylum-Refugee-Protection_Germany/asylum_refugee-policy-germany_node.html) , diakses pada tanggal 26 November 2018.
- “Batasi Pengungsi, Bulgaria, Serbia, Rumania Akan Tutup Perbatasan”,  
<http://www.beritasatu.com/dunia/316944-batasi-pengungsi-bulgaria-serbia-rumania-akan-tutup-perbatasan.html>, diakses pada tanggal 27 November 2018.
- “BBC: Slowakia Hanya Akan Menerima Pengungsi Kristen”,  
[http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/08/150819\\_dunia\\_slowakia\\_kristen](http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/08/150819_dunia_slowakia_kristen),  
 diakses pada tanggal 24 November 2018.
- “Bendung Laju Migran, Hungaria Tutup Perbatasan Dengan Kroasia”,  
[http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/10/151017\\_dunia\\_hungaria\\_migran](http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/10/151017_dunia_hungaria_migran),  
 diakses pada tanggal 27 November 2018.
- Bundestag, Deutscher, “Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland”,  
 diakses <https://www.uniaugsburg.de/einrichtungen/gleichstellungsbeauftragte/downloads/grundgesetz.pdf>,  
 pada tanggal 27 November 2018.
- Chu, Henry, “For Germany, refugees are a demographic blessing as well as a burden”,  
<http://www.latimes.com/world/europe/la-fg-germany-refugees-demographics-20150910-story.html>,  
 diakses pada tanggal 26 November 2018
- Cooper, Vincent, “Germany’s Demography and Economy Collapse”.  
[http://www.thecommentator.com/article/5907/germany\\_s\\_demographic\\_and\\_economic\\_collapse](http://www.thecommentator.com/article/5907/germany_s_demographic_and_economic_collapse),  
 diakses pada tanggal 28 November 2018
- “Fakta Mengenai Jerman – Migrasi dan Integrasi”, <http://www.tatsachen-ueberdeutschland.de/id/masyarakat/maincontent08/migrasi-dan-integrasi.html>,  
 diakses pada tanggal 27 November 2018
- “Federal Ministry of Education and Research: Recognition in Germany”,  
[https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/en/success\\_stories.php](https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/en/success_stories.php),  
 diakses pada tanggal 29 November 2018
- Fratzscher, Marcel & Junker, Simon, “Integration von Flüchtlingen – ein langfristige Investition”,  
[http://www.diw.de/sixcms/detail.php?id=diw\\_01.c.518260.de](http://www.diw.de/sixcms/detail.php?id=diw_01.c.518260.de),  
 diakses pada tanggal 29 November 2018
- “German Officials Laud New Integration Law as 'Historic Step’”,  
<http://www.dw.com/en/german-officials-laud-new-integration-law-as-historic-step/a-19186665>,  
 diakses pada tanggal 27 November 2018
- “Germany Wants Refugees to Integrate or Lose Residency Rights”,  
<http://www.reuters.com/article/us-europe-migrants-germany-integration-idUSKCN0WU147> ,  
 diakses pada tanggal 27 November 2018
- Gesley, Jenney, “Germany: Act to Integrate Refugees Enters Into Force”.  
<http://www.loc.gov/law/foreignnews/article/germany-act-to-integrate-refugees-enters-into-force/>,  
 diakses pada tanggal 26 November 2018
- Gortz, Birgitz, “Jerman dalam Statistik”, <http://www.dw.com/id/jerman-dalam-statistik/a-5505934>,  
 diakses pada tanggal 29 November 2018



- Gotev, Georgi, "Refugees Can Bring Significant Economic Benefits",  
<http://www.euractiv.com/section/euro-finance/news/refugees-can-bring-significant-economic-benefit-report/>, diakses pada tanggal 29 November 2018
- "Hukum Federal Jerman (Online)", <https://www.bundesanzeiger-verlag.de/>, diakses pada tanggal 29 November 2018
- Ignatzi, Christian "Jerman Membuka Diri Untuk Tenaga Kerja Terdidik",  
<http://www.dw.com/id/jerman-membuka-diri-untuk-tenaga-terdidik/a-16985276>, diakses pada tanggal 26 November 2018
- "Imigran dan Kekerasan Sayap Kanan di Jerman",  
[http://parstoday.com/id/news/world/17575imigran\\_dan\\_kekerasan\\_sayap\\_kanan\\_di\\_jerman](http://parstoday.com/id/news/world/17575imigran_dan_kekerasan_sayap_kanan_di_jerman), diakses pada tanggal 29 November 2018
- "Jerman Batalkan Politik Ramah Pengungsi", <http://m.dw.com/id/jerman-batalkan-politik-ramah-pengungsi/a-18713020>, diakses pada tanggal 27 November 2018.
- "Jerman Bisa Tampung 500 Ribu Pengungsi Per Tahun", <http://www.dw.com/id/jerman-bisatampung-500-ribu-pengungsi-per-tahun/a-18699788>, diakses pada tanggal 27 November 2018
- "Jerman Deportasi 80.000 Pengungsi di Tahun 2016", <http://www.voaislam.com/read/world-news/2017/02/20/49001/jerman-deportasi-80000-pengungsi-di-tahun-2016/#sthash.YsZyWdh4.dpbs>, diakses pada tanggal 29 November 2018
- "Jumlah Kekerasan di Jerman Menurun", <https://www.arahmah.com/2017/02/27/jumlah-kekerasan-anti-pengungsi-di-jerman-menurun>, diakses pada tanggal 28 November 2018
- "Kasus Pelecehan Seksual di Köln Picu Sentimen Anti Pengungsi"  
<http://www.dw.com/id/kasus-pelecehan-seksual-di-koeln-picu-sentimen-anti-pengungsi/a-18962771>, diakses pada tanggal 26 November 2018
- "Keanekaragaman yang Mengayakan", <https://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/id/kategori/masyarakat/keanekaragaman-yang-mengayakan>, diakses pada tanggal 28 November 2018
- "Kejahatan Berbasis Kebencian di Jerman Meningkat",  
[http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/05/160523\\_dunia\\_jerman\\_kebencian](http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/05/160523_dunia_jerman_kebencian), diakses pada tanggal 27 November 2018
- Kern, Soeren, "Germany's New Integration Law", <https://www.gatestoneinstitute.org/8145/germany-integration-law>, diakses pada tanggal 27 November 2018
- Kinkartz, Sabine,  
 "Jerman Untung Karena Politik Pembukaan Diri bagi Pengungsi?", <http://www.dw.com/id/jerman-untung-karena-politik-pembukaan-diri-bagi-pengungsi/a-19492144>, diakses pada tanggal 28 November 2018
- "Mahdi News: Kabinet Jerman Loloskan Undang-Undang Integrasi Pengungsi",  
<http://www1.mahdi-news.com/2016/05/26/kabinet-jerman-loloskan-undang-undang-integrasi-pengungsi/>, diakses pada tanggal 26 November 2018
- "Menangani Arus Pendetang", <https://www.tatsachen-ueber->

- [deutschland.de/id/kategori/masyarakat/menangani-arus-pendatang](http://deutschland.de/id/kategori/masyarakat/menangani-arus-pendatang), diakses pada tanggal 28 November 2018
- “Mengenal Lembaga Sistem Pemerintahan Jerman”, <http://www.bimbie.com/lembaga-pemerintahan-jerman.htm>, diakses pada tanggal 27 November 2018
- “Negara Federasi”, <https://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/id/kategori/negara-dan-politik/negara-federasi>, diakses pada tanggal 26 November 2018
- Oltermann, Philip, “Mama Merkel: The Compassionate Mother of Syrian Refugees”, <https://www.theguardian.com/world/shortcuts/2015/sep/01/mama-merkel-the-compassionate-mother-of-syrian-refugees>, diakses pada tanggal 26 November 2018
- Online, Bundesgesetzblatt, “Federal Law: Verordnung zum Integrationsgesetz”, [https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger\\_BGBI&jumpTo8](https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBI&jumpTo8), diakses pada tanggal 25 November 2018
- Patnistik, Egidius, “Jerman Cabut Perlakuan Istimewa Bagi Pengungsi”, <http://internasional.kompas.com/read/2016/01/04/10383541/Jerman.Cabut.Perlakuan.Istimewa.bagi.Pengungsi>, diakses pada tanggal 25 November 2018
- Sabrina, Whita, “Sistem Pemerintahan Parlemen Jerman”, <https://prezi.com/m/b7hoyqnrwdhd/sistem-pemerintahan-parlemen-jerman/>, diakses pada tanggal 25 November 2018
- Samosir, Hanna Azarya, “Jumlah Pengungsi yang Diterima oleh Jerman Berkurang”, <http://m.cnnindonesi.com/internasional/20160204170020134108951/jumlah-pengungsi-yang-diterima-di-jerman-berkurang/>, diakses pada tanggal 25 November 2018
- Setiawan, Yuli, “Sistem Politik Republik Federal Jerman”, <http://psmk.kemdikbud.go.id/konten/876/sistem-politik-republik-federal-jerman>, diakses pada tanggal 25 November 2018
- Sari, Amanda Puspita, “BBC: Ada Apa di Balik Kedermawanan Jerman kepada Pengungsi?”, <http://www.cnnindonesia.com/internasional/20150910145740-134-77901/ada-apa-di-balik-kedermawanan-jerman-kepada-pengungsi/>, diakses pada tanggal 29 November 2018
- “The Federal Government: Integration Act to Support and Challenge”, [https://www.bundesregierung.de/Content/EN/Artikel/2016/07\\_en/2016-05-25-integrationsgesetz-beschlossen\\_en.html](https://www.bundesregierung.de/Content/EN/Artikel/2016/07_en/2016-05-25-integrationsgesetz-beschlossen_en.html), diakses pada tanggal 25 November 2018